

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan Kinerjanya sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampain LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut ini dimaksudkan sebagai perwujudan untuk Pertanggung Jawaban keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut hal ini diukut berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2018 – 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dan juga penetapan Kinerja Tahun 2022, disamping itu penyusunan LAKIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk perbaikan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dimasa yang akan datang

Inti dari pertanggungjawaban kinerja adalah perbandingan antara target yang akan ditetapkan dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun anggaran, Hal ini menuntut adanya aktivitas pengelolaan data kinerja secara terus menerus selama periode kegiatan berlangsung. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten terhadap indicator yang telah disepakati dalam rencana kinerja.

Untuk menjamin dan mempertahankan obyektivitas hasil pengukuran kinerja tersebut, integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya yang lain mutlak diperlukan. Dalam jangka menengah keberhasilan strategi ini terlihat dari adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, sedangkan dalam jangka pendek, strategi ini berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, Adapun dalam jangka panjang, strategi ini akan menempatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut tetap eksis di era otonomi daerah.

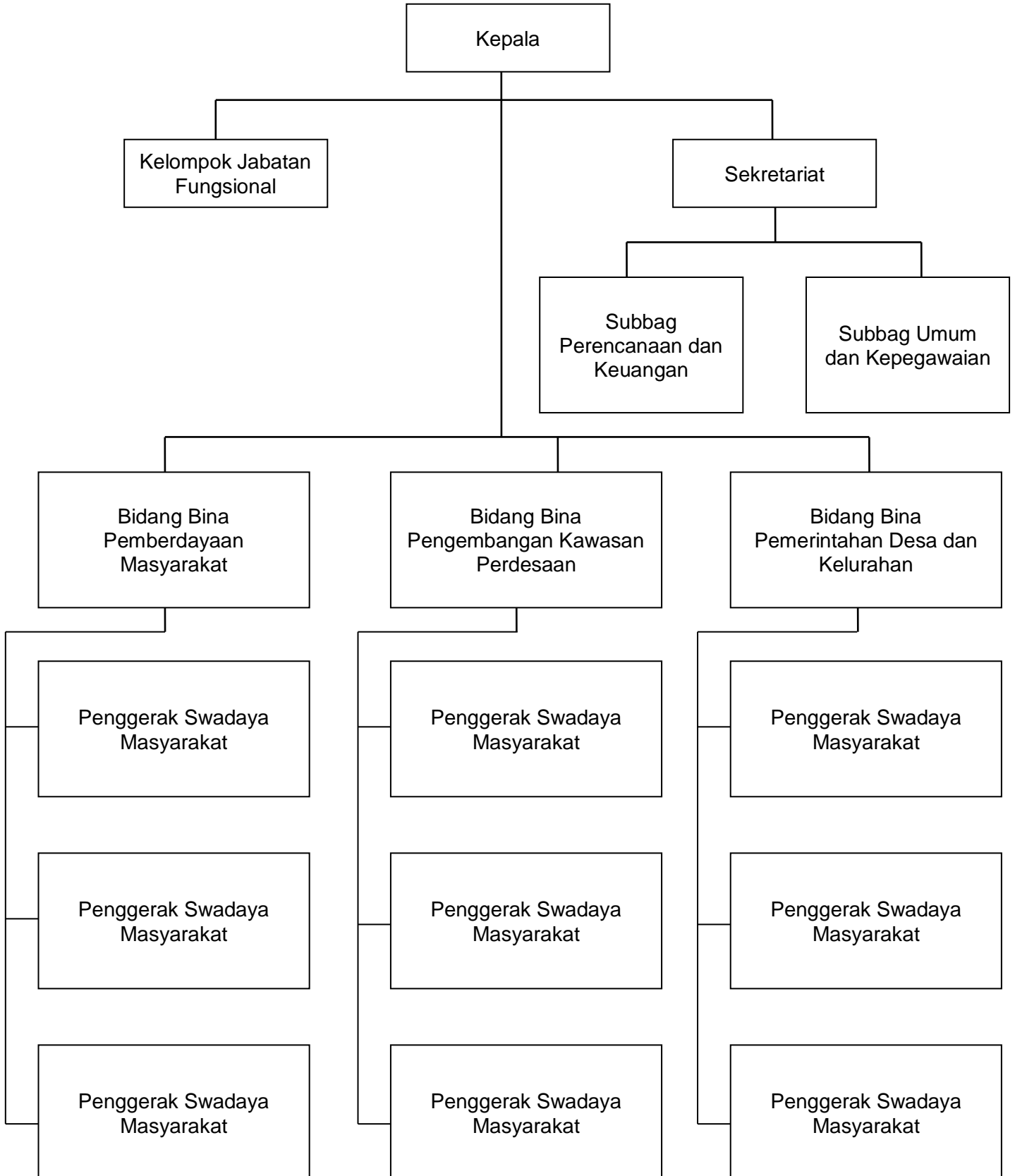
A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub system dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditunjukkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna..

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut juga merupakan amanat Perpres Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP.

B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

1. STRUKTUR ORGANISASI DPMD KABUPATEN TANAH LAUT



1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut adalah unsur Pendukung Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dibidang Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan dan Desa, Pengembangan Sosial Budaya dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengembangan Sosial Budaya dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
4. Pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Dinas, Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan Fungsi yang memerlukan keahlian tertentu secara professional sesuai dengan kebutuhan Organisasi.

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Tanah Laut pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023 terutama untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu ;

- Belum optimalnya pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

- Masih rendahnya Kualitas aparatur tingkat desa dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat
- Pendapatan desa masih rendah karena belum terbentuk serta belum dimanfaatkannya BUMDES sebagai sumber pendapatan desa
- Belum sepenuhnya penggunaan dana desa sebagai penggerak perekonomian desa
- Belum optimalnya penggunaan pemetaan potensi desa sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat desa masih berjalan ditempat
- Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha – usaha produktif masih rendah
- Sebagian besar desa di kabupaten Tanah Laut belum memiliki RPJM Desa dan RKP desa
- Kurang optimalnya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan kelompok masyarakat pembangunan desa
- Kurang optimalnya kegiatan pembinaan adat budaya desa
- Masih kurangnya pengetahuan aparat desa tentang pembangunan desa
- Alokasi dana desa sebagian besar diperuntukan untuk pembangunan fisik desa

Dalam kondisi kehidupan masyarakat pedesaan yang makin heterogen, sementara kemampuan pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan pedesaan makin terbatas, maka upaya percepatan pembangunan pedesaan memerlukan kebersamaan masyarakat sebagai penggerak utama. Pada situasi semacam ini, hanya melalui partisipasi aktif masyarakat desa memungkinkan dilakukan perubahan mendasar dalam gerak pembangunan desa.

Hal ini mengandung arti bahwa pengembangan pedesaan hanya memungkinkan dilakukan bila ada faktor pengikat yang menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat. Langkah utama yang perlu digali dan dikembangkan dalam upaya mengembangkan momentum baru pembangunan pedesaan adalah pengembangan sumber daya manusia pedesaan dan semua potensi desa yang dimiliki (local genius) secara terarah dalam berbagai jangka waktu untuk dilakukan pemberdayaan berkualitas.

Dengan adanya isu strategis Permasalahan pembangunan kabupaten Tanah Laut ini, masyarakat yang berdaya dan Pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi Penanggulangan kemiskinan yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selain solusi tersebut maka Dinas Pemberdayaan masyarakat melakukan pemetaan permasalahan yang mendasari permasalahan pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang menjadi urusan kewenangan Dinas Pemberdayaan masyarakat.

Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMD sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, DPMD Kabupaten Tanah Laut memiliki sumberdaya aparatur sampai pada keadaan Bulan Desember 2022 berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang pegawai yang terdiri dari :

- Kepala Dinas : 1 (satu) orang (S2, Administrasi Publik, IV.c)
- Sekretaris : 1 (satu) orang (S2, Magister Administrasi, IV.b)
- Kepala Bidang : 3 (tiga) orang terdiri :
 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat (S2, Manajemen SDM, IV.a),
 2. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan (S2, Pemerintahan Desa, IV.a),
 3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan (S1, Administrasi Negara, IV.b).
- Penggerak Swadaya Masyarakat Muda dan Sub Bagian : 8 (delapan) Orang terdiri :
 1. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (S1, Sarjana Ekonomi, III.d),
 2. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (S1, Sarjana Sosial, III.d),
 3. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (S1, Sarjana Teknik, III.d),
 4. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (S1, Sarjana Ekonomi, III.d),
 5. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (S1, Sarjana Sosial, III.c),
 6. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (S1, Sarjana Teknik, III.c),
 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (S1, Sarjana Ekonomi, III.b)
 8. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian (S1, Sarjana Ekonomi, III.c)
- Staf Golongan III, 1 (satu) orang dan
- Staf Golongan II ada 14 (empat belas) orang

D. PRODUK DAN LAYANAN

Untuk lebih mengefektifkan Kegiatan Perencanaan Pembangunan daerah maka berdasarkan Kepres Nomor 27 Tahun 1980 dibentuklah organisasi Dinas PMD selanjutnya dijabarkan dalam Kepmendagri Nomor 185 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PMD .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Organisasi perangkat Daerah, yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya Bumdes dan terdatanya jumlah pelaku usaha ekonomi masyarakat.
2. Melakukan pembinaan Posyantek, Posyantek yang aktif dalam pemanfaatan TTG dan Inovasi TTG yang dilombakan.
3. Melaksanakan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang se Kabupaten Tanah Laut, Rakor, Lomba, dan Pembinaan yang dilaksanakan oleh PKK dan Pembinaan P3MD.
4. Mengidentifikasi dan inventarisasi Lembaga Adat.
5. Melaksanakan sosialisasi Lembaga Adat Desa di 11 Kecamatan.
6. Membentuk Lembaga Adat Desa.
7. Melakukan pembinaan terhadap BKAD
8. Melaksanakan Bimtek Profil Desa.
9. Melaksanakan Bimtek/Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Melakukan Bimtek Penataan Administrasi Desa.
11. Melaksanakan Bimtek Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
12. Melaksanakan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa.
13. Melaksanakan pembentukan Desa Berciri Khas

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

- **Ringkasan Eksekutif**, Ringkasan garis besar ruang lingkup muatan lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- **Bab I Pendahuluan**, terdiri dari latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- **Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, terdiri dari VISI, MISI, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) 2022, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, terkait dengan Akuntabilitas kinerja organisasi maupun Akuntabilitas Keuangan.
- **BAB IV Penutup**, dalam Bab ini memuat ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan strategi peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- **Lampiran Lampiran**
 - IKU
 - Pernyataan Perjanjian Kinerja
 - Cascading/Pohon Kinerja
 - Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
 - Monev Renstra
 - Matrik Keselarasan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) disusun untuk memenuhi ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan serta Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Beberapa Kendala, serta hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun Berikutnya

Disadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukkandan saran dari semua pihak sangat diharapkan agar LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dapat disusun dengan lebih baik

Mudah-mudahan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut ini dapat bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan LAKIP ini di ucapkan Terima Kasih.

Pelehan, 20 Januari 2023
Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut


H. Bambang Kusudipaman, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19890818 199010 1 003

Ringkasan

Eksekutif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan serta Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 Memiliki Visi yaitu : **"Terwujudnya Tanah Laut Yang BERINTERAKSI (BERkarya, INovasi, TERTata, Religius, AKtual dan Sinergi)"** yang mana Visi tersebut Akan diwujudkan Melalui Misi yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Tahun 2021. Dalam proses dan upaya pencapaian visi dan misi tersebut diatas, pada saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Amanat Kinerja yang telah ditetapkan melalui Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta target yang terukur berdasarkan indikator Kinerja Utama (IKU) yang mana indikator Kinerja Utama tersebut merupakan alat Ukur Guna tercapainya sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun selanjutnya diperlukan kesinambungan yang perlu terus dipelihara dan dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unit yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

Pelahan, 20 Januari 2023

Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut


H. Bambang Kusudarmawan, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19680618 199010 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI... ..	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	3
C. Isu strategis.....	5
D. Produk dan Layanan	6
E. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. Visi RPJMD	18
B. Misi RPJMD	15
C. Tujuan dan Sasaran Strategi.....	20
D. Indikator Kinerja Utama.....	21
E. Perjanjian Kinerja.....	23
F. Program dan Kegiatan.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	53
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.	53
1. Sasaran RPJMD.....	64
2. Eselon II (Kepala Dinas).....	79
3. Eselon III (Sekretaris).....	94
1). Eselon IV (Kasubbag Umum Kepegawaian).....	98
2). Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan keuangan).....	103
4. Eselon III (Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat).....	107
5. Eselon III (Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan.....	157
B. Akuntabilitas Keuangan	191
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022.....	191
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.....	192
3. Perbandingan Program dan Kegiatan tahun 2021 dan 2022....	199

BAB IV	PENUTUP	200
	A. Kesimpulan.....	200
	B. Strategi Peningkatan Kinerja	201

LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI

“Terwujudnya Tanah Laut Yang BERINTERAKSI (BERkarya, INovasi, TErtata, Religius, AKtual dan SInergi)”

Penjelasan Visi:

Sebagai Penggerak Utama terkandung makna bahwa DPMD dengan keunggulan (advantage) yang dimilikinya memposisikan diri (positioning) sebagai instansi terdepan dan memiliki kemampuan untuk mensinergikan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat. Keunggulan dimaksud berkaitan dengan substansi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh DPMD memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh instansi lain.

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Tanah Laut menggunakan pendekatan komprehensif/holistik dan memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan sedangkan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Lembaga lainnya menggunakan pendekatan sektoral.

Keunggulan lain yang dimiliki DPMD adalah pengalaman empiris-historis pada saat melaksanakan tugas-tugas pembangunan masyarakat desa yang esensinya setara dengan tugas pemberdayaan masyarakat.

Memposisikan DPMD sebagai penggerak yang dapat mendorong dan memotivasi seluruh aparat DPMD untuk meningkatkan kinerja dan profesionalismenya serta tertantang untuk konsisten mengembangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan dapat diterima oleh stakeholder pemberdayaan masyarakat. Kata Terwujudkan, mengandung esensi adanya komitmen DPMD untuk melakukan upaya-upaya yang dinamis, sistematis, terencana dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Masyarakat Berdaya, memiliki esensi suatu keadaan dimasa depan yang menggambarkan masyarakat memiliki potensi dan kemampuan memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya dengan berbasis budaya. Kondisi ini sebagai kondisi positif yang mampu memberikan kontribusi kepada upaya mewujudkan Tanah Laut sejahtera. Tanah Laut Sejahtera, mengandung makna suatu keadaan yang menggambarkan masyarakat Tanah Laut mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar kehidupannya, terutama aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang didasari hubungan sosial yang berbudaya.

B. MISI

1. Berkarya Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, Sosial dan budaya
2. Menciptakan Inovasi di segala Sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan Industri Kreatif.
3. Membangun Tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas religius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat
5. Membangun Sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut memiliki peran dalam pencapaian terhadap :

- 1. Misi ke- 2 (dua), yakni** : Menciptakan Inovasi di segala Sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan Industri Kreatif.
 - Tujuan ke 2.2 : Peningkatan Inovasi di Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif.
 - Sasaran ke 2.2.1 : Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam Perekonomian.
- 2. Misi ke- 3 (tiga), yakni** : Membangun Tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).
 - Tujuan ke 3.1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi.
 - Sasaran ke 3.1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Pelayanan Publik.
 - Indikator Sasaran : Persentase Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan yang Tertib.
 - Sasaran ke 3.1.2 : Meningkatnya Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- 3. Misi ke- 5 (lima), yakni** : Membangun Sinergitas yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- Tujuan ke 5.1 : Peningkatan Kinerja Pembangunan yang Berkualitas Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya (Pembangunan Inklusif).
 - Sasaran ke 5.1.2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.
Indikator Sasaran : Cakupan Pembinaan Kelompok PKK.
 - Tujuan ke 5.5 : Peningkatan Upaya Membangun Desa, Menata Kota.
 - Sasaran ke 5.5.1 : Meningkatnya Desa Membangun.
 - Indikator Sasaran : Persentase Klasifikasi Status Desa

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, Tujuan di ditetapkan dengan mengacu kepada Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tujuan dan Indikator tujuan yang ingin dicapai dalam bidang Pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yakni :

1. Menciptakan Inovasi di segala Sendi Kehidupan Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif (**Misi 2**)

Indikator Tujuan :

- a. Terbentuk dan berkembangnya teknologi tepat guna di masyarakat, dengan terbentuknya Pos Pelayanan Tekonogi Tepat Guna (Posyantek TTG) didesa akan menumbuhkan rasa inovatif dalam menciptakan sebuah alat yang dapat dikembangkan oleh masyarakat yang nantinya akan menumbuhkan perekonomian didesa dan alat tersebut mempunyai mamfaat bagi orang banyak yang nantinya akan bernilai ekonomis.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi (**Misi 3**)
3. Peningkatan Kinerja Pembangunan yang Berkualitas Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya (Pembangunan Inklusif). (**Misi 5**)

Indikator Tujuan :

- a. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui tumbuh dan berkembangnya industri kerajinan rumah tangga dalam pemberdayaan PKK, melalui kegiatan pelatihan (pembuatan sasirangan, pembuatan kerajinan tangan, dll) maupun bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten serta pembinaan dan lomba-lomba yang dilaksanakan dikecamatan maupun desa-desa sehingga masyarakat desa akan menjadi mandiri dalam membuat sebuah usaha maupun menciptakan terampilan lainnya dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga.
4. Peningkatan Upaya Membangun Desa Menata Kota (**Misi 5**)

Indikator Tujuan :

- a. Indeks Desa Membangun.
5. Terwujudnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
 - b. Nilai RB

SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh Instansi Pemerintah dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan, adapun sasaran bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

“ Indeks Desa Membangun “

Indikator sasaran : Persentase Klasifikasi Status Desa

“ Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Indikator Sasaran : Nilai RB dan Nilai SAKIP

Selanjutnya akan diuraikan mengenai tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Upaya Membangun Desa, Menata Kota	Indeks Desa Membangun	Persentase Klasifikasi Status Desa	20%	20%	20%	20%	20%
2	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB dan Nilai SAKIP	75%	75%	75%	75%	75%

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sasaran target indikator kinerja utama adalah sasaran yang terkait dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah laut yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akutabilitas kinerja.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif, serta tingkat capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Indeks Desa Membangun	Persentase Klasifikasi Status Desa	Sasaran pada indikator ini dimaksudkan untuk meningkatkan status desa. Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah Desa yang naik Ststusnya / Jumlah Desa x 100%	DPMD Kabupaten Tanah Laut	DPMD Kabupaten Tanah Laut

**Target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Tanah Laut 2019 – 2023 dapat dilihat pada
tabel berikut :**

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi awal 2019	Target Kinerja 2023	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target Kinerja Sasaran				
							2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan upaya membangun desa, menata kota	Persentase Klasifikasi Status Desa	20%	100 %	Indeks Desa Membangun	Persentase Klasifikasi Status Desa	0%	20%	20%	20%	20%	20%

E. PERJANJIAN KINERJA 2022

Sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP, maka setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun “Penetapan Kinerja” berdasarkan alokasi anggaran yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas,transparansi dan kinerja aparatur
2. Komitmen anatara dua pihak penerima dengan pemberi amanah
3. Penilaian keberhasilan / kegagalan suatu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
4. Tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
5. Dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Tabel I

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Penanggung Jawab
1	Indeks Desa Membangun	Persentase Klasifikasi Status Desa	20%	Kepala Dinas
2	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarana prasarana perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dan terpelihara dengan baik	100%	Sekretaris
		Persentase Perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	100%	Sekretaris
		Persentase laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	Sekretaris
		Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPB	BB	Sekretaris
3	Meningkatnya ekonomi desa	Persentase usaha ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif dan Persentase pemetaan dan pendataan usaha ekonomi di desa	100%	Kabid Pemberdayaan Masyarakat

4	Meningkatnya pelayanan posyantek dalam pemanfaatan sumber daya alam	Persentase posyantek yang terbentuk dan aktif	100%	Kabid Pemberdayaan Masyarakat
5	Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat	Persentase terselenggaranya kegiatan partisipasi masyarakat	100%	Kabid Pemberdayaan Masyarakat
6	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Persentase LPM berprestasi	-	Kabid Pemberdayaan Masyarakat
7	Cakupan Pembinaan Kelompok PKK	Persentase PKK aktif	-	Kabid Pemberdayaan Masyarakat
8	Cakupan Pemeliharaan Sarana Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pemeliharaan sarana pascaprogram pemberdayaan masyarakat	-	Kabid Pemberdayaan Masyarakat
9	Cakupan Kinerja Pembinaan Penataan dan Administrasi Desa	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan ditata administrasinya	100%	Kabid Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan
10	Cakupan Kinerja Pembinaan Pengelolaan Aset Desa	Persentase pengelolaan keuangan dan aset desa	100%	Kabid Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan
11	Cakupan Kinerja Pembinaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%	Kabid Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan

12	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase pengembangan kawasan perdesaa	40%	Kabid Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan
13	Meningkatnya Kualitas Data Desa	Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa	40%	Kabid Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan
14	Meningkatnya Kemampuan Pengurus Lembaga Adat Desa	Persentase lembaga Adat desa yang dibina	40%	Kabid Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan
15	Cakupan Kinerja Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Persentase desa yang di evaluasi tingkat perkembangannya	-	Kabid Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan
16	Melaksanakan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD	- Jumlah administrasi perkantoran yang terpengaruh dan terlayani sesuai ketentuan	22 jenis 8 jenis 24 jenis 8 jenis 400 kali 1 tahun 24 kali	Kasubag Umum dan Kepegawaian
17	Melaksanakan pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasaranan kualitas SDM SKPD	Jumlah sarana prasarana dan SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	4 jenis 3 jenis 4 jenis 20 orang 1 unit 13 unit	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18	Melaksanakan penyebar luasan informasi pembangunan SKPD	Jumlah partisipasi kegiatan pameran pembangunan	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian

19	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renja, Renja perubahan dan Renstra)	3 dokumen	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
20	Melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD (LAKIP, LPPD/LKPJ)	2 dokumen	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
21	Pelaksanaan penyusunan SAKIP SKPD	Jumlah dokumen SAKIP SKPD (Pohon Kinerja, IKU dan PK)	3 dokumen	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
22	Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Bulanan, Tri Wulanan, Semesteran dan Laporan Keuangan akhir Tahun)	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan (Dokumen laporan keuangan bendahara pengeluaran, Laporan keuangan per Tri wulan, Laporan Keuangan Semesteran, CALK)	4 dokumen	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

F. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui pagu anggaran perubahan sebesar **Rp. 11.733.605.829** yang terdiri dari pagu anggaran untuk Belanja Tidak Langsung (gaji dan Tunjangan) **Rp. 6.727.262.158** dan Belanja Tidak Langsung Sebesar **Rp. 5.006.343.671** untuk 5 (lima) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan dengan realisasi belanja Sebesar **87 %** dengan Realisasi Kinerja/Fisik dengan Persentase 80,81 %, adapun Rincian Program dan Alokasi Anggaran dapat dilihat pada Tabel

Rincian Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM	ALOKASI	REALISASI (Rp)
A.	Belanja Tidak Langsung	5.006.343.671	4.227.845.815
	Belanja Pegawai		
1	- Belanja Gaji dan Tunjangan	2.598.386.729	4.227.845.815
2	- Tambahan Penghasilan	2.407.956.942	
B	Belanja Langsung	11.733.605.829	10.205.022.919
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.248.184.229	5.387.242.069
2	PROGRAM PENATAAN DESA	300.943.946	258.004.000
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	141.854.554	122.188.000
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.446.540.758	2.915.472.445
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.596.082.342	1.522.116.405

Belanja langsung Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 11.733.605.829,-** dengan **realisasi anggaran Rp. 10.205.122.919,-** dengan Program sebanyak 5 (lima) ,9 (sembilan) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan Pentaausahaan dan Pengujian/Verikasi Keuangan SKPD

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

B. Program Penataan Desa

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa

C. Program Peningkatan Kerjasama Desa

1. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

D. Program Administrasi Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- e. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- g. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- h. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

E. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas kinerja organisasi

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandate yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (Outcome) yang dicapai dalam tahun 2022 Kabupaten Tanah Laut.

Akuntabilitas Kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolak ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut maka ditetapkan Indikator Kinerja. Capaian Indikator Kinerja ini akan dinilai, dianalisis dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan Evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam tahun sebelumnya, terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap) dilakukan analisa penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan – tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja masa mendatang.

Capaian Indikator Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing–masing indicator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing– masing indicator disajikan pada tabel pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tahun 2022.

Capaian indikator IKU ini untuk tahun 2022 ini merupakan capaian tahun kedua dalam Renstra Tahun 2018 – 2023 (RENSTRA Tahun ke 2). Hal ini akan menjadi parameter keberhasilan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.

SASARAN RPJMD

VISI	: <i>Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi</i> * Berkarya * Inovasi * Tertata * Religius * Aktual * Sinergi		
MISI 5	Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Upaya membina Desa dan Menata Kota	Indeks Desa Membangun	1. Mendorong tertib administrasi dalam Pemerintahan Desa	1. Pembinaan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
		2. Mendorong partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa	2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa
		3. Mengoptimalkan peran aparatur baik di pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan	3. Pelatihan terhadap aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
		4. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan	
		5. Mengoptimalkan peran lembaga perekonomian desa dalam meningkatkan perekonomian desa	4. Pembinaan terhadap lembaga ekonomi desa
		6. Mendorong tertib administrasi pertanahan kawasan perdesaan	5. Pembinaan terhadap pemanfaatan lahan kawasan perdesaan
		7. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan kawasan perdesaan	6. Monitoring dan Evaluasi terhadap lahan kawasan perdesaan

Tabel
 Realisasi Capaian Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Desa Membangun	Persentase Klasifikasi Status Desa	20%	30,77%	128%
2	Meningkatnya kualitas pemenuhansarana prasarana perkantoran	Persentase sarana prasarana yang terpenuhi dengan baik	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dan terpelihara dengan baik	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Persentase perencanaan dan kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan & kinerja keuangan SKPD	Persentase laporan keuangan dan kinerja keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%

6	Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan, pelaporan	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	BB	BB	100%
7	Meningkatnya ekonomi desa	Persentase usaha ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif dan Persentase pemetaan dan pendataan usaha ekonomi didesa	100%	100%	100%
8	Meningkatnya pelayanan posyantek dalam pemanfaatan sumber daya alam	Persentase posyantek yang terbentuk dan aktif	100%	100%	100%
9	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Persentase terselenggaranya musyawarah desa	100%	100%	100%
10	Meningkatnya upaya pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan	Persentase dokumen perencanaan pengembangan kawasan perdesaan	40%	40%	100%
11	Meningkatnya kualitas data desa untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan desa	Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa	40%	40%	100%
12	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan adat dan budaya desa	Persentase lembaga adat desa yang aktif	40%	40%	100%
13	Meningkatnya administrasi desa	Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik	100%	100%	100%
14	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

15	Melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
16	Melaksanakan penyusunan SAKIP SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
17	Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (bulanan, triwulan, semesteran dan laporan keuangan akhir	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
18	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, SKPD	Jumlah administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	990 orang/kali, 11 kecamatan, 19 jenis dan 6 orang	564 orang/kali, 11 kec, 19 jenis dan 6 orang	57%
19	Melaksanakan pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dan kualitas SDM SKPD	Jumlah sarana prasarana dan SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	1 jenis, 1 jenis, 1 paket, 1 paket, 55 orang/kali, 55 orang/kali dan 2 jenis	2 jenis, 2 paket, 30 orang/kali dan 2 jenis	100%
20	Melaksanakan penyebaran informasi pembangunan SKPD	Jumlah partisipasi kegiatan pameran pembangunan Jumlah pembuatan website	1 paket 1 paket	1 paket -	100%

1. Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa Kategori Maju	24	46,15	192,29%
		2	Jumlah Desa di Bina Berciri Khas	5 Desa	7 Desa	140%
						146,145%

Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2022		
			2020	2021	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Desa Kategori Maju	%	19,23	21,54	24	33,08	128%
2	Jumlah Desa di Bina Berciri Khas	Desa	5	6	5	7	120%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							124%

Persentase Desa Kategori Maju

Untuk menghitung persentase desa kategori maju adalah dengan menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM). IDM adalah alat bantu “Teknokrasi” pengukuran perkembangan Status Kemandirian Desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa.

Realisasi indikator persentase desa kategori maju tahun 2022 adalah 46,15 %, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 24% dengan tingkat capaian kinerja 192,29 %. Mengalami peningkatan sebesar 13,07% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 33,08%. Realisasi tersebut sudah mencapai 164,29% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 28%.

Perhitungan persentase desa kategori maju diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Persentase desa kategori maju

= $\frac{\text{Jumlah desa kategori maju (Maju dan Mandiri)}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$

Jumlah desa

= $\frac{60 \text{ Desa}}{130 \text{ Desa}} \times 100\%$

130 Desa

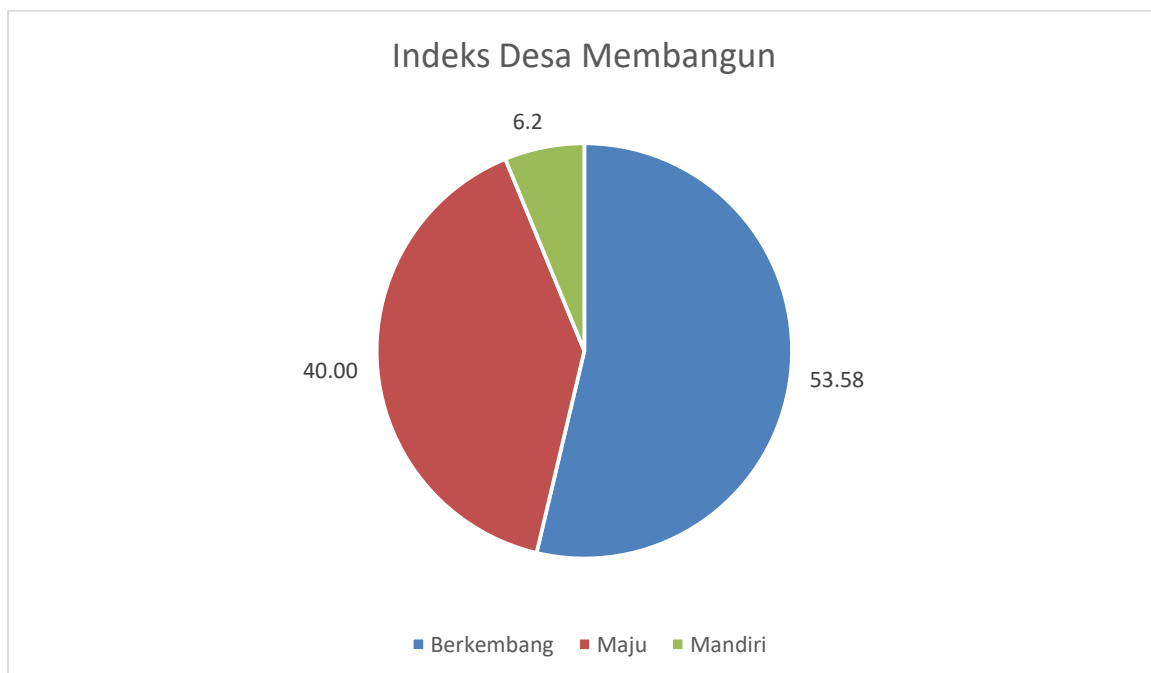
= 46,15%

Tabel 3.5.44
Klasifikasi Status Indeks Desa Membangun Menurut Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	STATUS IDM				
			SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
1	TAKISUNG	12	-	-	6	6	-
2	JORONG	11	-	-	5	4	2
3	PELAIHARI	15	-	-	10	4	1
4	KURAU	11	-	-	7	4	-
5	BATI-BATI	14	-	-	4	8	2
6	PANYIPATAN	10	-	-	5	4	1
7	KINTAP	14	-	-	6	7	1
8	TAMBANG ULANG	9	-	-	8	1	-
9	BATU AMPAR	14	-	-	5	8	1
10	BAJUIN	9	-	-	5	4	-
11	BUMI MAKMUR	11	-	-	9	2	-
JUMLAH		130	-	-	70	52	8

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sudah tidak ada lagi Desa kategori sangat tertinggal dan tertinggal, 70 Desa kategori berkembang, 52 Desa ketegori maju dan 8 Desa kategori mandiri dari total 130 desa se Kabupaten Tanah Laut.

Grafik 3.5.20
Indeks Desa Membangun



Persentase Desa Kategori Maju Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 terealisasi sebesar 46,15%, mengalami peningkatan sebesar 13,07% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 33,08%. Untuk tahun 2021 terdapat 5 desa mandiri dan 2 desa tertinggal sedangkan di tahun 2022 terdapat 8 desa dengan kategori mandiri dan sudah tidak ada lagi desa dengan kategori tertinggal.

Tabel 3.5.45

Kriteria Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 – 2022

No	Kriteria IDM	Jumlah Desa		
		2020	2021	2022
1	Sangat Tertinggal	0	0	0
2	Tertinggal	4	2	0
3	Berkembang	98	85	70
4	Maju	26	40	52
5	Mandiri	2	3	8
Jumlah		130	130	130

Indikator yang digunakan dalam menetapkan status desa dalam indeks desa membangun adalah IKS : Indeks Ketahanan Sosial, IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi, IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi). Sedangkan klasifikasi status desa dibedakan menjadi lima (5) status, yakni : (i) Desa sangat tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri.

Tabel 3.5.46
Klasifikasi Desa

No	Status Desa	Nilai Batas
1.	Sangat tertinggal	$\leq 0,4907$
2.	Tertinggal	$> 0,4907$ dan $\leq 0,5989$
3.	Berkembang	$> 0,5989$ dan $\leq 0,7072$
4.	Maju	$> 0,7072$ dan $\leq 0,8155$
5.	Mandiri	$> 0,8155$

Ada 3 pendekatan yang diambil oleh Kementerian Desa PDTT untuk mendorong desa semakin lebih cepat dalam melaksanakan pembangunan. Pertama, Jaring Komunitas Wiradesa. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbanyak kesempatan dan pilihan masyarakat desa dalam upaya menegakkan hak dan martabatnya, serta peningkatan memajukan

kesejahteraan, baik sebagai individu, keluarga maupun kolektiva. Sampai saat ini masalah yang dihadapi masyarakat desa adalah ketidakberdayakan dan marginalisasi. Masalah inilah yang menjadi faktor utama penyebab kemiskinan di wilayah pedesaan. Oleh sebab itu diharapkan dengan Jaring Komunitas Desa ini mampu mendorong ekspansi kapabilitas dengan memperkuat daya pada berbagai aspek kehidupan manusia warga Desa yang menjangkau aspek nilai dan moral, serta pengetahuan Lokal Desa.

Kedua, Lumbung Ekonomi Desa. Desa sebagai jenis entitas wilayah terkecil. Dalam suatu Negara, memiliki potensi sumber daya yang sangat beragam. Ketika potensi tersebut mampu untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa sendiri maka akan menjadi lumbung komoditas ekonomi. Pengembangan lumbung ekonomi tidak akan pernah lepas dengan masalah modal, jaringan dan informasi. Oleh karena itu lembaga ekonomi yang dibentuk di desa harusnya sudah mempunyai kapasitas dan kualitas yang sudah mumpuni. Dalam Konteks ini BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) sebagai penggerak perekonomian harus mampu dan tanggap dengan kesempatan dan peluang ekonomi yang bias dikembangkan. Ketiga, Lingkar Budaya Desa. Budaya desa merupakan ruh keterkaitan emosional warga yang terbentuk dari kebersamaan persaudaraan, kekerabatan dan kolektivitas yang mengakar lama dalam masyarakat. Budaya desa yang seperti ini akan mampu mengarahkan, membimbing secara kolektif untuk tetap pada jalur dan tujuan program pembangunan. Norma dan nilai budaya desa yang telah ada sejak lama secara otomatis akan mengontrol program tersebut hingga menghasilkan kemajuan hingga sampai pada kesejahteraan masyarakat. Tiga pendekatan inilah yang kemudian menghasilkan tiga kategori dalam melakukan penilaian keberhasilan program pembangunan desa atau yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi (Lingkungan).

Tabel 3.5.47
Klasifikasi Status Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO	KRITERIA IDM	JUMLAH DESA
1	Sangat Tertinggal	0
2	Tertinggal	0
3	Berkembang	70
4	Maju	52
5	Mandiri	8
Jumlah		130

Derap pembangunan di wilayah pedesaan di Kabupaten Tanah Laut terus melaju pesat. Pembangunan di Kabupaten Tanah Laut mulai terus ditingkatkan dari tahun 2020 sampai

sekarang, khususnya mengenai perkembangan kemajuan di 130 Desa. Dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri, maka diperlukan ketersediaan data dasar Pembangunan Desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana ketentuan Permendes PD TT-RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasar Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi Desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri.

Target kenaikan status Desa selain didasarkan pada capaian prestisius tahun lalu, juga dikarenakan masifnya pembangunan di seluruh Desa di Kabupaten Tanah Laut. Baik yang mempergunakan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) serta berbagai sumber pendapatan lainnya.

Dari 130 desa di Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari 11 Kecamatan, pada tahun 2022 di Kabupaten Tanah Laut sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal (0 persen), yang pada tahun 2021 Desa Tertinggal ada 2 Desa (1,54 persen). Kemudian, Desa Berkembang pada tahun 2021 sebanyak 85 Desa (65,38 persen) turun menjadi 70 Desa (53,85 persen) pada tahun 2022. Desa Maju pada tahun 2021 sebanyak 40 Desa (30,77 persen) naik menjadi 52 Desa (40 persen) pada tahun 2022. Dan Desa Mandiri pada tahun sebelumnya ada 5 Desa (3,85 persen) sekarang pada tahun 2021 menjadi 8 Desa (6,15 persen).

Dalam upaya menjalankan strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa di Kabupaten Tanah Laut telah dibuat dan diterbitkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2022 tentang Strategi Pencapaian Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Dimana perlu dilakukan secara terpadu dan koordinasi, dengan melibatkan berbagai SKPD, terkait sasaran pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil analisa IDM Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 dan Keputusan Menteri Desa, PDT & Trans RI Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022, di Kabupaten Tanah Laut terdapat 8 (delapan) Desa Mandiri, 52 (lima puluh dua) Desa Maju dan 70 (tujuh puluh) Desa Berkembang, tidak ada lagi Desa berstatus Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal. Dan pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Kabupaten terbaik pertama atas prestasi pembangunan dalam peningkatan status dan kemandirian Desa, dalam menolak / tidak ada lagi Desa berstatus Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal, dan Pemberian Penghargaan Desa Dengan Status Mandiri Tahun 2022 dari Menteri Desa, PDT dan Trans kepada Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar, Desa Kait-Kait Baru dan Desa Padang Kec. Bati-Bati, Desa Jorong dan Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong, Desa Bukit Mulya Kec. Kintap, Desa Batu Mulya Kec. Panyipatan dan Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari berdasarkan Keputusan Menteri Desa, PDT dan Trans RI Nomor 105 Tahun 2022, dan ada 23 (dua puluh tiga) Desa mendapat piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan atas prestasi dalam pembangunan sebagai Desa dengan Peningkatan Status Desa nya, dari Desa Tertinggal menjadi

Desa Berkembang, dari Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

Komitmen dan kesungguhan Pemerintah pada semua tingkatan mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Dan tidak ketinggalan partisipasi para Pendamping Desa serta semua pihak yang terkait. Karena itu, sinergi harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan, sehingga status Desa Tertinggal tidak ada lagi di Kabupaten Tanah Laut ini, semuanya sudah naik menjadi Desa Berkembang, Maju dan Desa Mandiri.

Pembangunan desa merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sehingga banyak upaya yang dilakukan diantaranya:

1. Program peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa Sebesar 50%, dari tahun 2018 – hingga 2023 nanti. Pada tahun 2021 dan 2022 Desa dapat membangun desa dalam segala dimensi, baik itu pembangunan infrastruktur (jalan desa, saluran irigasi, jalan pertanian) yang memudahkan akses masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, kegiatan pagelaran budaya di desa, peningkatan kualitas sumberdaya manusia desa melalui kegiatan pelatihan kepada pemuda di desa misalnya tata rias, memasak, perbengkelan dan lain-lain. Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Tanah Laut untuk pagu tahun anggaran 2018-2021 adalah sebesar :
 - a. Tahun 2018, ADD yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 76.717.987.513,00 atau 10% dari jumlah DAU dan DBH yang diterima, untuk 130 Desa di Kabupaten Tanah Laut.
 - b. Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 132.096.433.930,00 atau mengalami kenaikan 72% dari tahun 2018.
 - c. Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 138,765,257,820,00 atau mengalami kenaikan 81% dari tahun 2018 dan 5% dari tahun 2019.
 - d. Tahun 2021 sebesar Rp. 115.040.966.190 dari total anggaran Rp. 115.040.966.190 dengan persentase capaian 100%.
 - e. Realisasi bantuan keuangan ADD tahun 2022 sebesar Rp. 115.040.966.190 dari total anggaran Rp. 115.040.966.190 dengan persentase capaian 100%
2. Bupati mengamanatkan kepada Inspektorat Kabupaten sejak Tahun 2019 untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi keuangan dan kinerja, dan di tahun 2019 telah dilakukan audit kepada 109 Desa dari total 130 Desa dan di tahun 2020 telah dilaksanakan audit kepada 29 Desa, Tahun 2021 dilaksanakan audit penyelenggaraan terhadap desa sebanyak 11 Desa dikarenakan 2 tahun terakhir terjadi adanya pandemi Covid 19, dan pada tahun 2022 dilaksanakan audit penyelenggaraan terhadap desa sebanyak 11 Desa.
Kegiatan-kegiatan pengawasan dalam rangka pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain:
 - a. Pengawasan kebijakan pengelolaan APBDesa yang lebih mengutamakan pada pemberdayaan tenaga kerja dan potensi lokal secara mandiri dalam pengerjaan kegiatan pembangunan dengan fokus pada aspek efektivitas dan efisiensi yang menggunakan anggaran dana desa.

- b. Pengawasan pengelola administrasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan BPD dalam pengelolaan APBDesa sehingga tidak terjadi kerugian keuangan negara/daerah.
 - c. Pemberian sosialisasi dalam rangka peningkatan Kapasitas SDM Perangkat dan BPD Desa.
 - d. Melakukan Reviu penyaluran dan Penggunaan APBDesa setiap Triwulan.
 - e. Pengawasan pengelola Penatausahaan Aset Desa.
 - f. Pengawasan terhadap efektifitas kinerja Perangkat Desa, Penggunaan tenaga kerja, organisasi desa yang telah dibentuk.
 - g. Melakukan tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
 - h. Melakukan koordinasi terhadap dugaan adanya penyelewengan dana desa dari masyarakat diantaranya dengan meminta hasil laporan audit dari Inspektorat.
3. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan upaya sebagai berikut:
- a. Melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan SKPD lain (Focus Group Discussion/FGD) dalam rangka bersama-sama menjadikan desa-desa yang berkembang menjadi maju dan mandiri yang merupakan sasaran dari forum ini sehingga semua program yang ada di masing-masing SKPD dapat bersinergi yang sudah barang tentu untuk peningkatan status desa tersebut.
 - b. Mengawal penggunaan ADD desa dengan melaksanakan monitoring serta evaluasi penggunaan DD dan ADD yang dikururkan pemerintah pada desa-desa yang status desanya masih sangat tertinggal dan tertinggal apakah sudah sesuai dan mendukung dalam peningkatan status desanya.
 - c. Melakukan penguatan Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPM dll) serta BumDes melalui kegiatan bimtek/pelatihan/pembinaan agar mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk mendukung percepatan peningkatan status desa.
 - d. Melaksanakan pembinaan desa yang memiliki ciri khas untuk terus meingkatkan potensi desa melalui kerjasama dengan SKPD terkait, agar menumbuhkan usaha-usaha kecil di desa.

Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selain terus melaksanakan kegiatan kegiatan yang baik yang telah dilaksanakan dan perbaikan-perbaikan yang masih dianggap kurang juga akan menjalankan strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa yaitu neningkatkan keterpaduan, koordinasi, dengan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, terkait sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan kemandirian Desa di Kabupaten Tanah Laut.

a. Jumlah Desa Dibina Berciri Khas

Dalam rangka mempercepat Pembangunan Desa dan Pembangunan Masyarakat Desa, di Kabupaten Tanah Laut juga telah terbentuk Desa Berciri Khas. Desa Berciri Khas yaitu Desa yang memiliki karakteristik khusus yang dapat ditinjau dari aspek sosial budaya, masyarakat Desa setempat masih mempertahankan tradisi turun temurun dalam kehidupan sosial dan budaya. Sementara pada aspek geografi tergantung dari potensi alam tempat tinggal masyarakat Desa. Kebanyakan masih menggantungkan hidup dengan kondisi alam setempat sesuai potensi alamnya, misalnya daerah pesisir yang rata-rata adalah nelayan.

Sedangkan warga yang hidup dipinggiran hutan akan mengandalkan potensi hutan setempat utk bertahan hidup. Sementara dari aspek SDM yaitu masyarakat Desa setempat memiliki keterampilan khusus sebagai mata pencaharian yang mana mereka hidup dari industri kerajinan atau Desa pengrajin dan rata-rata biasanya bersifat homogen.

Jadi Desa Berciri Khas sesuai karakteristik desa masing-masing tersebut dengan potensi yang ada perlu digali, dipertahankan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa setempat dan sekaligus pelestarian alam dapat terjaga dengan baik.

Realisasi indikator Jumlah Desa di bina berciri khas di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 terealisasi sebanyak 7 desa dari target 5 desa, sehingga capaian kinerja jumlah desa dibina berciri khas adalah sebesar 140%. mengalami peningkatan sebanyak 2 Desa jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 6 Desa. Realisasi tersebut sudah mencapai 140% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 5 Desa.

Ke 7 (tujuh) desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur
2. Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati
3. Desa Kali Besar Kecamatan Kurau
4. Desa Damit Kecamatan Batu Ampar
5. Desa Guntung Besar Kecamatan Pelaihari
6. Desa Tabanio Kecamatan Takisung
7. Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap

Jumlah Desa dibina berciri khas tahun 2022 adalah sebanyak 7 Desa. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 6 Desa. Berikut daftar desa di bina berciri khas tahun 2021 dan 2022.

Tabel 3.5.48
Desa dibina berciri khas 2021 – 2022

No	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau	Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur
2	Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati	Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati
3	Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan	Desa Kali Besar Kecamatan Kurau
4	Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang	Desa Damit Kecamatan Batu Ampar
5	Desa Tanjung Kecamatan Bajuin	Desa Guntung Besar Kecamatan Pelaihari
6	Desa Tungkaran kecamatan Pelaihari	Desa Tabanio Kecamatan Takisung
7		Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap

Pada Tahun 2022 telah dilakukan kegiatan pencaanangan desa berciri khas di Tanah Laut yang kemudian dilakukan pembinaan. Untuk desa yang dibina berciri khas dari 5 desa yang ditargetkan sudah terlaksana semua (bahkan ada penambahan 2 desa berciri khas) yaitu dengan melaksanakan pembinaan terhadap desa yang berciri khas.

Berikut kegiatan koordinasi Desa Berciri Khas yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2022 :

1. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas yang dihadiri oleh Kepala SKPD / yang mewakili, Tujuh Kecamatan yang dtunjuk berciri khas. Kecamatan tersebut memilih Desa yang mempunyai ciri khasnya.
2. Rapat koordinasi dan konsolidasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas yang dihadiri oleh Bupati Tanah Laut, Kepala SKPD/ yang mewakili, Tujuh Kecamatan dan Tujuh Kepala Desa yang ditunjuk berciri khas yaitu Desa Sungai Rasau Kec. Bumi Makmur Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati, Desa Kali Besar Kec. Kurau, Desa Damit Kec. Batu Ampar, Desa Guntung Besar Kec. Pelaihari ,Desa Tabanio Kec. Takisung dan Desa Riam Adungan Kec. Kintap. Desa tersebut mempunyai adanya karakteristiknya masing-masing Desa, wisata, Kultur budaya dan alamnya.
3. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur, desa yang memilki potensi olahan dari Rambai. Yang diputuskan dinamakan Kampung Rambai Bogem. Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut. Pencanaangan Desa Berciri Khas Sungai Rasau sebagai Kampung Rambai Bogem 21 November 2022 yang di hadiri Bupati Tanah Laut.
4. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati, lokasi yang bertepatan di pinggir jalan menuju arah Pelaihari – Banjarmasin potensi yang di miliki desa liang angang yaitu purun banyak olahan purun bisa di buat dengan tas dompet dan topi. Yang diputuskan dinamakan Kampung Purun. Pencanaangan Desa Berciri Khas Liang Anggang sebagai Kampung Purun tanggal 22 November 2022 yang di hadiri Bupati Tanah Laut / yang

mewakili

5. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Kali Besar Kecamatan Kurau yaitu mengenai olahan ikan pakasam dari olahan ikan sapat, haruan, nila, gabus dan papuyu. Yang diputuskan dinamakan Kampung Pakasam Kali besar. Yang dihadiri oleh Bupati Tanah Laut / yang mewakili.
6. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Damit Kecamatan Bartu Ampar yaitu dengan adanya bendungan yang ada di Desa Damit. Maka dari itu Yang diputuskan dinamakan TIRTA DAM. Yang dihadiri oleh Bupati Kab. Tanah Laut / yang diwakili, enam Kecamatan dan enam kepala Desa yang ditunjuk berciri khas dan dihadiri Kepala SKPD/ yang mewakili. Pencanangan Desa Berciri Khas Damit sebagai TIRTA DAM tanggal 28 November 2022 yang di hadiri Bupati Tanah Laut/ yang mewakili
7. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas di Desa Guntung Besar Kecamatan Pelaihari dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa yaitu sebagai Desa berciri khas “Kampung Lahang” yang mempunyai pohon lahang di Desa Guntung Besar. Pencanangan Desa Berciri Khas Guntung Besar sebagai Kampung Lahang tanggal 6 Desember 2022 yang di hadiri Bupati Tanah Laut/ yang mewakili
8. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang berciri khas di Desa Tabanio Kecamatan Takisung dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa yaitu dimana masyarakat banyak menelayang dan pengeringan ikan asin di daerah tabanio sehingga dinamakan Desa Pengering ikan asin. Pencanangan Desa BerciriKhas Tabanio sebagai Desa Pengering Ikan Asin tanggal 8 Desember 2022 yang di hadiri Bupati Tanah Laut/ yang mewakili
9. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang berciri khas di Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa yaitu dimana Desa Riam Adungan memiliki pohon Ulin yang bisa di olah keterampilan dan karya seperti ulekan rumah pohon gelas dan lain lain, Pencanangan Desa BerciriKhas Riam Adungan sebagai Kampung Ulin tanggal 13 Desember 2022 yang di hadiri Bupati Tanah Laut/ yang mewakili

Dalam mencapai sasaran meningkatnya pembinaan desa di dukung oleh 5 Program dengan pagu Rp. 11.733.605.829 dengan realisasi sebesar Rp. 10.205.122.919 atau sebesar 87%.

Tabel 3.5.49
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.248.184.229	5.387.342.069
2	PROGRAM PENATAAN DESA	300.943.946	258.004.000
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	141.854.554	122.188.000
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.446.540.758	2.915.472.445
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.596.082.342	1.522.116.405
Jumlah		11.733.605.829	10.205.122.919

2. Sasaran Eselon II (Kepala Dinas)

Berdasarkan Target dan Realisasi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Eselon II yang ditetapkan pada tahun 2022 telah terealisasi sesuai yang diinginkan, sehingga dengan demikian apa yang menjadi Visi, Misi dan Bupati Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan dokumen Renstra SKPD yang telah targetkan. Penjelasan analisa capaian IKU dapat di lihat di bawah ini :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Indikator Sasaran Strategis
Tahun Anggaran 2022

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Indeks Desa Membangun	Persentase Klasifikasi Status Desa	20%	18,11%	90,55%

Tabel 3.2
Data Capaian terhadap Tahun 2021 - 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Desa Membangun	Persentase Klasifikasi Status Desa	20%	11,72	58,60%	20%	18,11%	90,55%
Rata-Rata Capaian Kinerja								90,55%

1). Perbandingan Realisasi dengan Target

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

“ Persentase Klasifikasi Status Desa “

Sasaran pada indikator ini dimaksudkan untuk meningkatkan status desa dengan Formulasi Penghitungan dalam indikator Kinerja ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Desa yang naik statusnya}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2022 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut untuk Persentase Klasifikasi Status Desa yang ditargetkan 20% hanya tercapai 18,11%. Dibandingkan pada tahun 2021 ada kenaikan capaian sebesar 6,39% walaupun secara terget memang belum tercapai yang merupakan Kondisi tahun keempat dari

Target Renstra 5 Tahunan, dari target 20% atau target yang direncanakan membentuk meningkatkan klasifikasi status desa dari 20% terealisasi sebesar 18,11% atau sebanyak 23 desa dari 130 desa yang mengalami kenaikan status desa. Hal ini didukung oleh Komitmen dan Niat Desa untuk meningkatkan klasifikasi status desa dengan menyesuaikan keadaan Potensial Desa dan beberapa kegiatan pendukung lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Melalui Program, kegiatan dan sub kegiatan.

2). Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Realisasi kinerja tahun 2022 yang dicapai dengan perbandingan tahun 2021 terdapat kenaikan 5 desa, ini karena kenaikan klasifikasi status desa (semua kenaikan klasifikasi) yang pada tahun 2021 sebesar 11,72% sedangkan tahun 2022 sebesar 18,11%.

Sedangkan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya terdapat kenaikan setiap tahunnya. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target sudah tercapai, sesuai dengan yang ditargetkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

REKAP INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2021 dan 2022
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KRITERIA IDM	JUMLAH DESA	
		2021	2022
	Rata -Rata nilai IDM		
1	Sangat Tertinggal	0	0
2	Tertinggal	2	0
3	Berkembang	85	70
4	Maju	40	52
5	Mandiri	3	8
JUMLAH		130	130

3). Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada tahun 2022 pencapaian yang dicapai Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk persentase klasifikasi status desa yang di targetkan 20% tercapai 18,11%. Secara umum klasifikasi status desa untuk tahun 2022 sudah ada 8 desa yang menjadi desa mandiri, jadi Indeks Desa Membangun (IDM) ini disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu proses dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan desa.

Keberhasilan ini dicapai dengan memperhatikan ketersediaan data yang bersumber dari potensi desa yang diterbitkan Pusat Statistik, merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi social, ekonomi dan budaya.

Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM) untuk persentase klasifikasi status desa agar bias digunakan sebagai basis data pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrument koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

3. Sasaran Eselon III (Sekretaris)

Hasil Capaian Realisasi Sasaran Pada Sekretariat

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase sarana prasarana yang terpenuhi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dan terpelihara dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Persentase perencanaan dan kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase laporan keuangan dan kinerja keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	B	BB	CC	BB	BB	100%
Rata-rata Capaian							100%

a). Perbandingan Realisasi dengan Target

Pada tahun 2022 capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Sekretaris yang di capai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk persentase semua indikator yang bersangkutan mencapai 100%.

b). Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Realisasi kinerja tahun 2022 yang dicapai dengan perbandingan tahun 2021 ada perbedaan. Karena untuk realisasi nilai SAKIP ada kenaikan yang semula pada tahun 2021 mendapatkan nilai CC dan pada tahun 2022 mendapatkan nilai SAKIP BB.

c). Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada tahun 2022 pencapaian yang dicapai Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk persentase sarana prasarana yang terpenuhi dengan baik, persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dan terpelihara dengan baik, persentase perencanaan dan kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan, persentase laporan keuangan dan kinerja keuangan SKPD sesuai ketentuan dan Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang di targetkan memenuhi target yaitu 100% dari yang ditargetkan 100%.

d). Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Adapun beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja untuk mencapai target yang ditentukan adalah :

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarana Prasarana perkantoran	Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		493.312.391,-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.742.281,-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.410.693,-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.218.978,-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.131.439,-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342.528.000,-
2	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		580.738.557,-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.056.134,-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.750.000,-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510.932.423,-

3	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.545.567,-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.003.879,-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.541.688,-
4	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan & kinerja keuangan SKPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.013.204.564,-
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	5.006.343.671,-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	6.860.893-
5	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		152.482.150-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	25.000.000,-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	127.482.150,-

4. Sasaran Eselon III (Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat)

Hasil Capaian Realisasi Sasaran Pada Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya ekonomi desa	Persentase usaha ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif dan Persentase pemetaan dan pendataan usaha ekonomi didesa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya pelayanan posyantek dalam pemanfaatan SDA	Persentase posyantek yang terbentuk dan aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Persentase terselenggaranya musyawarah desa	-	34%	96%	100%	0%	0% (tidak ada kegiatan dan anggaran)
		Rata-rata Capaian						100%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata – rata Capaian Kinerja Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat telah terealisasi 100%. Dari 3 indikator kinerja, indikator Persentase usaha ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif dan Persentase pemetaan dan pendataan usaha ekonomi didesa telah tercapai 100% dari target 100%, indikator Persentase posyantek yang terbentuk dan aktif telah tercapai 100% dari target 100%, indikator Persentase terselenggaranya kegiatan

partisipasi masyarakat telah tercapai 100% dari target 100% (target manunggal tuntung pandang 29 desa sedangkan realisasi 29 desa), indikator Persentase PKK aktif telah tercapai 100% dari target 100%. Untuk 2 indikator yaitu Persentase LPM berprestasi dan Persentase pemeliharaan sarana pasca program pemberdayaan masyarakat tidak terealisasi karena memang tidak ada kegiatan dan tidak dianggarkan pada tahun 2022.

b) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

Perbandingan target tahun 2022 dengan tahun 2021 yang terdiri dari 3 indikator Persentase Kelompok Usaha Ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif telah tercapai 100% pada tahun 2022 dan juga tahun 2021 sebelumnya. Pada indikator Persentase Posyantek yang terbentuk dan aktif telah tercapai 100% pada tahun 2022 dan juga tahun 2021 sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2022 ada penambahan 3 indikator lagi yaitu indikator Persentase LPM berprestasi, indikator Persentase PKK aktif dan indikator Persentase pemeliharaan sarana pasca program pemberdayaan.

c) Analisis Peningkatan / Penurunan Kinerja

- Persentase Kelompok Usaha Ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif.
Persentase Kelompok Usaha Ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 ditargetkan mencapai angka 100%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan Persentase Kelompok Usaha Ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif berada pada Seksi Bina Pemberdayaan Ekonomi Usaha Masyarakat.
- Persentase Posyantek yang terbentuk dan aktif.
Persentase Posyantek yang terbentuk dan aktif yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 ditargetkan mencapai angka 100%.
- Persentase terselenggaranya kegiatan partisipasi masyarakat.
Persentase terselenggaranya kegiatan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 terealisasi 100 % dari target 100%.
- Persentase LPM berprestasi.
Persentase LPM berprestasi di tahun 2022 tidak dilaksanakan karena tidak ada kegiatan yang dianggarkan.
- Persentase PKK aktif.
Persentase PKK aktif yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 terealisasi 100% dari target 100%.

- Persentase pemeliharaan sarana pasca program pemberdayaan masyarakat.

Persentase pemeliharaan sarana pasca program pemberdayaan masyarakat di tahun 2022 tidak dilaksanakan karena tidak ada kegiatan yang dianggarkan.

Pencapaian atas semua target indikator ini tercapai atas kerja keras dan kerjasama seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut khususnya pada Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat.

d) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ekonomi desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	67.587.350,-
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	66.665.473,-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.544.374.609
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	159.992.317
				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	393.072.414,-
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	154.882.072
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	18.817.946

				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	41.148.577,-
2	Meningkatnya pelayanan posyantek dalam pemanfaatan sumber daya alam	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	249.989.764,-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	75.436.900,-
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	61.586.961, -

3	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Masyarakat Hukum Adat	677.953.812,-
4	Persentase PKK aktif			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	531.114.905,-

Badan Usaha Milik Desa yang terbentuk

NO		KEC/ DESA	NAMA BUMDES	Tanggal Pendirian	Jenis Usaha	Status
1		KEC. PELAIHARI				
	1	Ambungan	Kayangan Makmur	06 Juli 2015	Fotocopy & Laminating	Tidak
	2	Tampang	Amanah	10 Juni 2013	Penggemukan Sapi, Pengelolaan gedung olahraga	Aktif
	3	Telaga	Sejahtera Bersama	xx xxxx 2018	Penggemukan sapi, SPP	Aktif
	4	Bumi Jaya	Karya jaya	13 Januari 2016	Jasa, Pengelolaan Pasar Desa, SP, Perdagangan, pengelolaan obyek wisata	Aktif
	5	Panjaratan	Makmur Bersama	26 Juni 2019	Pariwisata, Saprodi, Penyewaan Tenda, Foto copy, ATK, Jual beli	Tidak
					Gabah, Pengelolaan air bersih	
	6	Kampung Baru	Karya Bersama	12 Oktober 2017	Pengadaan pupuk, Pangkalan gas, SP, Bulog	Aktif
	7	Panggung Baru	Gawi Manuntung	01 Juli 2019	Penggemukan Sapi, Penyewaaan Organ, Saprodi, SP	Tidak
	8	Sungai Riam	Riam Jaya Abadi	01 Juli 2019		
	9	Ujung Batu	Jaya Makmur Keramaian	01 Juli 2019		
	10	Sumber Mulia	Sumber Rezeki	01 Juli 2020		
	11	Tungkaran	Tungkaran Mandiri	14 Juli 2020		
2		KEC. BAJUIN				
	1	Tirta Jaya	Bina Bersama	24 Mei 2016	Kompos, material, sembako	Tidak
	2	Ketapang	Tunas Karya	25 Oktober 2016	sembako, material	Tidak
	3	Tebing Siring	Mugi Rahayu	18 Desember 2017	Jasa, Kerjasama pihak ke 3	Aktif
	4	Sei Bakar	Gawi Bersama	24 Juni 2019	Pengelolaan Gedung Olahraga, Penyewaan Sound system, Madu Kalulut, Penjualan Saprodi, Material	Aktif

	5	Galam	Mandiri Bersama	03 Juli 2019	Jasa Pembayaran listrik, Madu Kalulut, Pengadaan Material, Peternakan Unggas petelur, Pengelolaan air bersih, Pengelolan wisata	Tidak
	6	Pemalongan	Fajar Sejahtera	27 Agustus 2019	Pengelolaan Gedung olahraga, Toko ATK	Aktif
	7	Tanjung	Tanjung Raya Perkasa	27 Agustus 2019		
	8	Kunyit	Kunyit Berusaha Selalu	04 Agustus 2020		
	9	Bajuin	Kayuh Baimbai	28 September 2020		
3		KEC. BATU AMPAR				
	1	Damit	Bina Sejahtera	06 Juli 2015	Penggemukan sapi dan SP	Aktif
	2	Batu Ampar	Batu Ampar	Tahun 2011	Perguliran Dana	Aktif
	3	Durian Bungkok	Durian Bungkok	01 Juni 2016	Unit Pasar	Aktif
	4	Gunung Mas	Gunung Mas	10 Maret 2018	Penjualan Sembako	Aktif
	5	Pantai Linuh	Maju Jaya	29 Oktober 2018	Pengelolaan air bersih, Pengadaan Material	Tidak
	6	Tajau Mulya	Tajau Mulya Makmur	01 Juli 2018	Bidang Produksi dan perdagangan	Tidak
	7	Damar Lima	Tunas Abadi	14 Mei 2018	Penggemukan Sapi, Pengelolaan Air Bersih	Tidak
	8	Jilatan	Berkat Maju Bersama	xx xxxx 2018	Jasa PPOB	Aktif
	9	Gunung Melati	Mekar Sedayu	xx xxxx 2019		
	10	Jilatan Alur	Makmur Jaya	xx xxxx 2019		
	11	Bluru	Berkah Jaya Mandiri	xx xxxx 2019		
4		KEC. JORONG				
	1	Simpang 4 Sungai Baru	Karya Putra Pribumi	16 Mei 2017	Jasa Angkutan, Perkebunan, Peternakan	Tidak
	2	Asam Jaya	Bina Bakti Sejahtera	11 Juni 2014	pengelola pasar, pamsimas	Tidak
	3	Alur	Harapan Sejahtera	29 Oktober 2014	Air Bersih	Aktif
	4	Karang Rejo	Sejahtera	15 September 2016	penggemukan sapi dan jasa	Aktif
	5	Swarangan	Marlin Jaya Mandiri	November 2018	Jual Beli BBM, Pengelolaan Pasar, Pengadaan Tenaga Kerja	Aktif

	6	Asam-asam	Maju Jaya Bersama	01 Desember 2018	Jasa, Perikanan	Tidak
	7	Jorong	Berkah Ibu	24 April 2019	Tambak Ikan, Saprodi, Jual beli sawit, Kerjasama pihak ke 3, Pelelangan Ikan	
	8	Sabuhur	Berkat Bersama	8 Tahun 2018	Peternakan	Tidak
5		KEC. KINTAP				
	1	Pandan Sari	Mitra Rumpun Pandansari	12 Nopember 2015	Pasar Desa, Wisata Desa, Jasa	Aktif
	2	Kintap	Al-Mu'awanah	02 September 2015	Jasa angkutan, penggemukan ternak, simpan pinjam	Tidak
	3	Kintapura	Amanah	19 Oktober 2015	Foto copy dan ATK	Tidak
	4	Sungai Cuka	Srindat Jaya	20 Oktober 2015	Jasa, Pertanian, Peternakan, IRT	Tidak
	5	Riam Adungan	Riam Jaya	13 Oktober 2015	Jasa, perdagangan, perkebunan, industri	Tidak
	6	Muara Kintap	Muara Maju Bersama	22 Juni 2015	IRT, Perikanan, Perkebunan, Peternakan, pasar desa, SP, Pengadaan barang Jasa	Tidak
	7	Salaman	Salaman Membangun	05 Mei 2015	Jasa Angkutan dan perkebunan	Tidak
	8	Kintap Kecil	Riam Jaya	25 September 2015	Tani, Kebun, Ternak, Jasa IRT	Tidak
	9	Pasir Putih	Barkat Manuntung	03 September 2015	Perkebunan, pertanian, material, SP, Peternakan, Jasa	Tidak
	10	Sumber Jaya	Usaha Bersama	28 September 2015	Perikanan, IRT, Jasa, Peternakan	Aktif
	11	Bukit Mulia	Berkah Mulia	30 September 2015	Pertanian, Perkebunan, perdagangan, Jasa, Pertambangan	Tidak
	12	Kebun Raya	Maju Bersama	30 September 2015	Perkebunan, IRT, Jasa	Tidak
	13	Mekar Sari	Maju Bersama	28 September 2015	Jasa, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, IRT, SPP	Tidak
	14	Sebamban Baru	Bumdes Maju Bersama	19 Oktober 2015	-	Tidak
6		KEC. TAKISUNG				
	1	Benua Tengah	Maju Bersama	01 Juli 2018	Saprotan, Pengelolaan Sampah	Tidak
	2	Sumber Makmur	Maju Jaya	14 Desember 2017	Perdagangan, Jasa	Tidak
	3	Pagatan Besar	Bina Maju Lestari	10 Agustus 2018	Ekowisata Hutan Mangrove	Aktif

	4	Kuala Tambangan	Batu Lima Tambangan	22 Oktober 2018	Jasa, Perdagangan	Tidak
	5	Ranggang	Karya Bersama	10 Nov 2018	Pengelolaan Portal, Pembuatan Harang	Tidak
	6	Batilai	Jaya Bersama	28 Nopember 2018	Persewaan Peralatan Pesta, Pengelolaan Wisata	Tidak
	7	Telaga Langsung	Berkat Sepakat	04 Desember 2018	Jasa, Perdagangan	Tidak
	8	Gunung Makmur	Maju Bersama	17 Desember 2018	Jasa, Perdagangan	Tidak
	9	Takisung	Karya Bhakti Bersama	05 Desember 2018	Pengelolaan Wisata Pantai	Tidak
	10	Benua Lawas	Bangun Banua	05 Desember 2019		
	11	Ranggang Dalam	Berkat Bakula	05 Desember 2019		
	12	Tabanio	Usaha Bersama	05 Desember 2019		
7		KEC. PANYIPATAN				
	1	Tanjung Dewa	Tanjung Bersama	01 Desember 2014	Industri RT, Simpan pinjam	Tidak
	2	Batakan	Bangun Banua	28 Nopember 2014	Konstruksi, Industri RT), SPP, Wisata, Pertanian, perkebunan, perikanan	Tidak
	3	Kandangan Baru	Munggu Jaya	02 April 2016	ATK, Saprotan	Tidak
	4	Sukaramah	Karya Mandiri	02 April 2019		
	5	Kuringkit	Rakat Mufakat	06 Juli 2020		
	6	Panyipatan	Panyipatan Jaya	13 Juli 2020		
	7	Kandangan Lama	Kandangan Lama Sejahtera	14 Juli 2020		
8		KEC. TAMBANG ULANG				
	1	Martadah Baru	Tri Tunggal Mandiri	30 Januari 2018	Jasa, Pasar Desa, Objek wisata, Bank Sampah, Perdagangan	Aktif
	2	Pulau Sari	Rakat Mufakat	27 Desember 2018	Jasa, Pasar Desa, Bank Sampah	Aktif
	3	Martadah	Tarini Jaya	11 Maret 2019	Bank Sampah, Pengelolaan Air Bersih, Pengelolaan Portal	Tidak
	4	Gunung Raja	Sinar Jaya	08 April 2019	Cafetaria, Kios Desa, Bank Sampah, Kerjasama Pihak ke 3	Tidak

	5	Bingkulu	Bingkulu Sejahtera	05 Juli 2019	Jual Saprodi, Jasa PPOB, Penggemukan sapi, ATK dan Foto copy	Tidak
	6	Sungai Jelai	Sungai Jelai Sejahtera	05 Agustus 2020		
	7	Sungai Pinang	Sungai Pinang Jaya Abadi	23 Oktober 2020		
9		KEC. BATI- BATI				
	1	Ujung	Ujung	01 Maret 2018	Usaha Batako	Tidak
	2	Banyu Irang	Maju Bersama	01 Maret 2018	Jasa, Perdagangan, Perkebunan	Aktif
	3	Banua Raya	Benua Raya Mufakat	18 Desember 2015	Pertanian, SP	Tidak
	4	Nusa Indah	Anugerah Jaya	18 Maret 2016	Jasa, Waserda, Saprotan, SP	Tidak
	5	Ujung Baru	Gawi Sabumi	09 Desember 2016	Pertanian, Jasa, SP, Sewa Tenda	Aktif
	6	Pandahan	Boga Jaya	11 Januari 2017	Pasar Desa, Desa Wisata	Aktif
	7	Bentok Darat	Bentok Darat sejahtera	28 Juli 2018	Jasa penyewaan Tenda, Pertanian	Aktif
	8	Sambangan	Gawi Manuntung	14 September 2018	Perdagangan, Jasa	Tidak
	9	Padang	Padang Berkah Makmur	23 September 2019	-	Tidak
	10	Bentok Kampung	Mandiri Sejahtera	23 September 2019		
	11	Liang Anggang	Berkah Karya Abadi	23 Juni 2020		
	12	Kait-Kait	Maju Bersama	21 September 2020		
10		KEC. KURAU				
	1	Bawah Layung	Amanah	23 September 2019		
	2	Tambak Karya	Karya Bersama	18 Agustus 2020		
	3	Tambak Sarinah	Jaya Sejahtera	23 September 2020		
	4	Sarikandi	Sarikandi Maju	27 Agustus 2020		
11		KEC. BUMI MAKMUR				
	1	Bumi Harapan	Jaya Sejahtera	23 Maret 2017	Jasa, perdagangan	Tidak
	2	Sungai Rasau	Anugerah	19 Juli 2017	Waserda, Pertanian, Perikanan	Aktif
	3	Handil Gayam	Berkat Usaha	16 Maret 2018	Jasa, Saprotan	Aktif
	4	Handil Birayang Atas	Ruhui Rahayu	01 April 2018	Jasa dan Sarana Produksi	Aktif

	5	Handil Birayang Bawah	Sumber Makmur	24 Mei 2018	Jasa dan Saprodi	Tidak
TOTAL BUMDesa =			124			

Foto Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan BUMDesa



Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
Rakor Tim Pembina BUMDesa Kabupaten Tanah Laut



Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Musyawarah Desa Pendirian/Revitalisasi BUMDesa



Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
Pembinaan BUMDesa pada Manunggal Tuntung Pandang



Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
Peningkatan Kapasitas BUMDesa oleh Dinas PMD Kab. Tanah Laut

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti lembaga kemasyarakatan lainnya	Jumlah melaksanakan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga lainnya	KPMD dan KPSPAM 1 kali	KPMD dan KPSPAM 1 kali	100%
2	Melaksanakan pendokumentasi kegiatan SDA dan TTG	Jumlah pendokumentasian kegiatan SDA dan TTG	50 alat teknologi tepat guna	24 alat teknologi tepat guna	48% (target sesuai 24 pada indikator keg)
3	Melaksanakan kegiatan sosialisasi Posyantek	Jumlah melaksanakan kegiatan sosialisasi Posyantek	10 kali	10 kali	100%
4	Melaksanakan pelatihan TTG serta penguatan kelembagaan PosyantekDes	Jumlah melaksanakan pelatihan TTG serta penguatan Kelembagaan	1 kali	1 kali	100%
5	Melaksanakan rembuk posyantek	Jumlah melaksanakan rembuk posyantek	1 kali	1 kali	100%
6	Melaksanakan gelar dan lomba kreasi dan inovasi TTG	Jumlah melaksanakan gelar dan lomba kreasi dan inovasi TTG	1 kali	1 kali	100%
7	Melaksanakan keikutsertaan gelar TTG Tingkat Nasional	Jumlah melaksanakan keikutsertaan gelar TTG TNasional		-	Kegiatan tidak dianggarkan karena terbatasnya pagu anggaran SKPD
	Rata-rata capaian				85%

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah melaksanakan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga lainnya		Tidak ada kegiatan	KPMD dan KPSP AM 1 kali	KPMD dan KPSPAM 1 kali	KPMD dan KPSPAM 1 kali	100%
2	Jumlah pendokumentasian kegiatan SDA dan TTG	-	62 alat TTG	24 alat TTG	50 alat TTG	24 alatTTG (target sesuai 24 pada indikator keg)	48%
3	Jumlah melaksanakan kegiatan sosialisasi Posyantek			10 kali	10 kali	10 kali	100%
4	Jumlah melaksanakan pelatihan TTG serta penguatan Kelembagaan		Tidak dilaksanakan karena covid 19	1 kali	1 kali	1 kali	100%
5	Jumlah melaksanakan rembuk posyantek		Tidak ada kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	100%
6	Jumlah melaksanakan gelar dan lomba kreasi dan inovasi TTG		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%
7	Jumlah melaksanakan keikutsertaan gelar TTG Tk. Nasional	1 TTG	0	0	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan karena tidak di anggaran
Rata-rata Capaian							91,33%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata – rata kinerja Seksi Bina Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan TTG terealisasi 100%, sesuai dengan apa yang telah ditergetkan.

b) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2021 (85%) dan tahun 2022 (91%), sesuai target volumenya.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Tahun 2022 indikator kinerja jumlah terlaksananya koordinasi KPMD dan jumlah terlaksananya koordinasi KPSPAM sesuai target dalam DPA.

- Jumlah pendokumentasian kegiatan SDA dan TTG.

Tahun 2022 indikator kinerja jumlah pendokumentasian kegiatan SDA dan TTG ini hanya ditargetkan dilaksanakan 24 alat TTG tidak sesuai dengan yang ditargetkan 50 alat TTG atau 48%, hal ini disebabkan karena pada saat pelaksanaan terbatas pada pagu anggaran SKPD.

- Jumlah melaksanakan kegiatan sosialisasi Posyantek.

Tahun 2022 indikator kinerja jumlah melaksanakan kegiatan sosialisasi Posyantek ini tercapai sesuai target 100%.

- Jumlah melaksanakan pelatihan TTG serta penguatan Kelembagaan.

Tahun 2022 indikator kinerja jumlah melaksanakan pelatihan TTG serta penguatan Kelembagaan ini tercapai sesuai target 100%..

- Jumlah melaksanakan rembuk posyantek.

Tahun 2022 indikator kinerja jumlah melaksanakan rembuk posyantek terealisasi sesuai target 100%.

- Jumlah melaksanakan gelar dan lomba kreasi dan inovasi TTG.

Tahun 2022 indikator kinerja jumlah melaksanakan gelar dan lomba kreasi dan inovasi TTG ini terealisasi sesuai target 100% walaupun dengan mengurangi jumlah volume orangnya.

- Jumlah melaksanakan keikutsertaan gelar TTG Tk. Nasional.

Tahun 2022 kegiatan ini tidak dianggarkan.

Foto Kegiatan Sumber Daya Alam dan TTG



Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi(Posyantek) tersebut pada Hari Senin tanggal 5 April 2022 dengan jumlah 35 orang peserta, Kegiatan terdiri dari unsur pemuda berupa karang taruna gapoktan, tokoh Masyarakat dan pelaku TTG sendiri yang ada di wilayah Desa Gunung Makmur



Telah dilaksanakan perjalanan dinas Melaksanakan Sosialisasi dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati. Pelaksanaan tersebut pada Selasa, 6 April 2022 dengan jumlah 35 orang peserta



Melaksanakan Sosialisasi dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa Asri Mulya Kecamatan Jorong. Pelaksanaan pada Jumat 9 April 2022 dengan jumlah 35 orang peserta, Kegiatan terdiri dari unsur pemuda berupa karang taruna gapoktan, tokoh Masyarakat dan pelaku TTG sendiri yang ada di wilayah Desa Asri Mulya



Pelaksanaan tersebut pada Hari Senin tanggal 24 Mei 2022 Pukul 11.00 Pagi dengan jumlah 35 orang peserta, Kegiatan terdiri dari unsur pemuda berupa karang taruna gapoktan, tokoh Masyarakat dan pelaku TTG sendiri yang adadi wilayah Desa Kali Besar



pada tanggal 24 November 2022 di tempat gedung balairung tuntung pandang pelaihari dihadiri oleh Bupati Tanah Laut, PT. Arutmin Indonesia Site Asam - Asam, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan,SKPD, Camat se Kab. Tanah Laut, Tenaga Ahli P3MD dan posyantek se Kab.Tanah

a) Analis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang kinerja Seksi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Melakukan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK)	677.953.812,-
2	Melaksanakan Pembinaan TMMD				
3	Melaksanakan rakor posyandu				
4	Memantau pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK dalam menyelenggarakan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga			Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	513.114.905,-

- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Pelaksanaan Manunggal Tuntung Pandang di tahun 2022 dengan target indikator keluaran 29 desa terealisasi 29 desa atau 100%. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 677.953.812,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 654.764.000,- atau 96,58%

- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Tim Penggerak PKK melakukan pembinaan terhadap 147 PKK aktif dengan target 100% dan terealisasi sesuai target 100%. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 531.114.905,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 506.432.305,- atau 95,35%

DATA PKK AKTIF SE-KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN	NAMA PKK	KETERANGAN
1	Kabupaten Tanah Laut	TP. PKK Kabupaten Tanah Laut	AKTIF
2	Kecamatan Takisung	TP. PKK Kecamatan Takisung	AKTIF
3	Benua Lawas	TP. PKK Desa Benua Lawas	AKTIF
4	Tabonio	TP. PKK Desa Tabonio	AKTIF
5	Kuala Tambangan	TP. PKK Desa Kuala Tambangan	AKTIF
6	Takisung	TP. PKK Desa Takisung	AKTIF
7	Gunung Makmur	TP. PKK Desa Gunung Makmur	AKTIF
8	Benua Tengah	TP. PKK Desa Benua Tengah	AKTIF
9	Ranggang	TP. PKK Desa Ranggang	AKTIF
10	Pagatan Besar	TP. PKK Desa Pagatan Besar	AKTIF
11	Batilai	TP. PKK Desa Batilai	AKTIF
12	Ranggang Dalam	TP. PKK Desa Ranggang Dalam	AKTIF
13	Telaga Langsung	TP. PKK Desa Telaga Langsung	AKTIF
14	Sumber Makmur	TP. PKK Desa Sumber Makmur	AKTIF
15	Kecamatan Jorong	TP. PKK Kecamatan Jorong	AKTIF
16	Sabuhur	TP. PKK Desa Sabuhur	AKTIF
17	Jorong	TP. PKK Desa Jorong	AKTIF
18	Asam-Asam	TP. PKK Desa Asam-Asam	AKTIF
19	Batalang	TP. PKK Desa Batalang	AKTIF
20	Swarangan	TP. PKK Desa Swarangan	AKTIF

21	Muara Asam-Asam	TP. PKK Desa Muara Asam-Asam	AKTIF
22	Alur	TP. PKK Desa Alur	AKTIF
23	Asri Mulia	TP. PKK Desa Asri Mulia	AKTIF
24	Karang Rejo	TP. PKK Desa Karang Rejo	AKTIF
25	Asam Jaya	TP. PKK Desa Asam Jaya	AKTIF
26	Simpang Empat Sei Baru	TP. PKK Desa Simpang Empat Sei Baru	AKTIF
27	Kecamatan Pelaihari	TP. PKK Kecamatan Pelaihari	AKTIF
28	Kelurahan Angsau	TP. PKK Kelurahan Angsau	AKTIF
29	Kelurahan Saranag Halang	TP. PKK Kelurahan Saranag Halang	AKTIF
30	Kelurahan Pelaihari	TP. PKK Kelurahan Pelaihari	AKTIF
31	Kelurahan Pabahanan	TP. PKK Kelurahan Pabahanan	AKTIF
32	Kelurahan Karang Taruna	TP. PKK Kelurahan Karang Taruna	AKTIF
33	Bumi Jaya	TP. PKK Desa Bumi Jaya	AKTIF
34	Sei Riam	TP. PKK Desa Sei Riam	AKTIF
35	Tampang	TP. PKK Desa Tampang	AKTIF
36	Telaga	TP. PKK Desa Telaga	AKTIF
37	Panjaratan	TP. PKK Desa Panjaratan	AKTIF
38	Atu-atu	TP. PKK Desa Atu-atu	AKTIF
39	Panggung	TP. PKK Desa Panggung	AKTIF
40	Tungkaran	TP. PKK Desa Tungkaran	AKTIF
41	Ujung Batu	TP. PKK Desa Ujung Batu	AKTIF
42	Panggung Baru	TP. PKK Desa Panggung Baru	AKTIF
43	Ambungan	TP. PKK Desa Ambungan	AKTIF
44	Guntung Besar	TP. PKK Desa Guntung Besar	AKTIF
45	Kampung Baru	TP. PKK Desa Kampung Baru	AKTIF
46	Sumber Mulia	TP. PKK Desa Sumber Mulia	AKTIF
47	Pemuda	TP. PKK Desa Pemuda	AKTIF
48	Kecamatan Kurau	TP. PKK Kecamatan Kurau	AKTIF
49	Sungai Bakau	TP. PKK Sungai Bakau	AKTIF

50	Maluka Baulin	TP. PKK Maluka Baulin	AKTIF
51	Bawah Layung	TP. PKK Bawah Layung	AKTIF
52	Tambak Sarinah	TP. PKK Tambak Sarinah	AKTIF
53	Kali Besar	TP. PKK Desa Kali Besar	AKTIF
54	Handil Negara	TP. PKK Desa Handil Negara	AKTIF
55	Padang Luas	TP. PKK Desa Padang Luas	AKTIF
56	Kurau	TP. PKK Desa Kurau	AKTIF
57	Tambak Karya	TP. PKK Desa Tambak Karya	AKTIF
58	Raden	TP. PKK Desa Raden	AKTIF
59	Sarikandi	TP. PKK Desa Sarikandi	AKTIF
60	Kecamatan Bati-Bati	TP. PKK Kecamatan Bati-Bati	AKTIF
61	Benua Raya	TP. PKK Desa Benua Raya	AKTIF
62	Bati-Bati	TP. PKK Desa Bati-Bati	AKTIF
63	Ujung	TP. PKK Desa Ujung	AKTIF
64	Liang Anggang	TP. PKK Desa Liang Anggang	AKTIF
65	Bentok Kampung	TP. PKK Desa Bentok Kampung	AKTIF
66	Bentok Darat	TP. PKK Desa Bentok Darat	AKTIF
67	Banyu Irang	TP. PKK Desa Banyu Irang	AKTIF
68	Nusa Indah	TP. PKK Desa Nusa Indah	AKTIF
69	Pandahan	TP. PKK Desa Pandahan	AKTIF
70	Padang	TP. PKK Desa Padang	AKTIF
71	Ujung Baru	TP. PKK Desa Ujung Baru	AKTIF
72	Sambangan	TP. PKK Desa Sambangan	AKTIF
73	Kait-Kait	TP. PKK Desa Kait-Kait	AKTIF
74	Kait-kait Baru	TP. PKK Desa Kait-kait Baru	AKTIF
75	Kecamatan Panyipatan	TP. PKK Kecamatan Panyipatan	AKTIF
76	Batu Tungku	TP. PKK Desa Batu Tungku	AKTIF
77	Panyipatan	TP. PKK Desa Panyipatan	AKTIF
78	Kandangan Baru	TP. PKK Desa Kandangan Baru	AKTIF

79	Kandangan Lama	TP. PKK Desa Kandangan Lama	AKTIF
80	Batakan	TP. PKK Desa Batakan	AKTIF
81	Kuringkit	TP. PKK Desa Kuringkit	AKTIF
82	Tanjung Dewa	TP. PKK Desa Tanjung Dewa	AKTIF
83	Suka Ramah	TP. PKK Desa Suka Ramah	AKTIF
84	Batu Mulya	TP. PKK Desa Batu Mulya	AKTIF
85	Bumi Asih	TP. PKK Desa Bumi Asih	AKTIF
86	Kecamatan Kintap	TP. PKK Kecamatan Kintap	AKTIF
87	Pandan Sari	TP. PKK Desa Pandan Sari	AKTIF
88	Kintap	TP. PKK Desa Kintap	AKTIF
89	Kintapura	TP. PKK Desa Kintapura	AKTIF
90	Sei Cuka	TP. PKK Desa Sei Cuka	AKTIF
91	Riam Adungan	TP. PKK Desa Riam Adungan	AKTIF
92	Muara Kintap	TP. PKK Desa Muara Kintap	AKTIF
93	Salaman	TP. PKK Desa Salaman	AKTIF
94	Kintap Kecil	TP. PKK Desa Kintap Kecil	AKTIF
95	Pasir Putih	TP. PKK Desa Pasir Putih	AKTIF
96	Sumber Jaya	TP. PKK Desa Sumber Jaya	AKTIF
97	Bukit Mulia	TP. PKK Desa Bukit Mulia	AKTIF
98	Kebun Raya	TP. PKK Desa Kebun Raya	AKTIF
99	Mekar Sari	TP. PKK Desa Mekar Sari	AKTIF
100	Sebamban Baru	TP. PKK Desa Sebamban Baru	AKTIF
101	Kecamatan Tambang Ulang	TP. PKK Desa Kecamatan Tambang Ulang	AKTIF
102	Bingkulu	TP. PKK Desa Bingkulu	AKTIF
103	Gunung Raja	TP. PKK Desa Gunung Raja	AKTIF
104	Kayu Abang	TP. PKK Desa Kayu Abang	AKTIF
105	Martadah	TP. PKK Desa Martadah	AKTIF
106	Martadah Baru	TP. PKK Desa Martadah Baru	AKTIF
107	Pulau Sari	TP. PKK Desa Pulau Sari	AKTIF

108	Sungai Jelai	TP. PKK Desa Sungai Jelai	AKTIF
109	Sungai Pinang	TP. PKK Desa Sungai Pinang	AKTIF
110	Tambang Ulang	TP. PKK Desa Tambang Ulang	AKTIF
111	Kecamatan Batu Ampar	TP. PKK Kecamatan Batu Ampar	AKTIF
112	Batu Ampar	TP. PKK Desa Batu Ampar	AKTIF
113	Gunung Mas	TP. PKK Desa Gunung Mas	AKTIF
114	Tajau Mulia	TP. PKK Desa Tajau Mulia	AKTIF
115	Jilatan	TP. PKK Desa Jilatan	AKTIF
116	Durian Bungkok	TP. PKK Desa Durian Bungkok	AKTIF
117	Ambawang	TP. PKK Desa Ambawang	AKTIF
118	Damit	TP. PKK Desa Damit	AKTIF
119	Gunung Melati	TP. PKK Desa Gunung Melati	AKTIF
120	Bluru	TP. PKK Desa Bluru	AKTIF
121	Pantai Linuh	TP. PKK Desa Pantai Linuh	AKTIF
122	Damit Hulu	TP. PKK Desa Damit Hulu	AKTIF
123	Jilatan Alur	TP. PKK Desa Jilatan Alur	AKTIF
124	Damar Lima	TP. PKK Desa Damar Lima	AKTIF
125	Tajau Pecah	TP. PKK Desa Tajau Pecah	AKTIF
126	Kecamatan Bajuin	TP. PKK Kecamatan Bajuin	AKTIF
127	Tirta Jaya	TP. PKK Desa Tirta Jaya	AKTIF
128	Galam	TP. PKK Desa Galam	AKTIF
129	Pemalongan	TP. PKK Desa Pemalongan	AKTIF
130	Sungai Bakar	TP. PKK Desa Sungai Bakar	AKTIF
131	Tanjung	TP. PKK Desa Tanjung	AKTIF
132	Bajuin	TP. PKK Desa Bajuin	AKTIF
133	Ketapang	TP. PKK Desa Ketapang	AKTIF
134	Kunyit	TP. PKK Desa Kunyit	AKTIF
135	Tebing Siring	TP. PKK Desa Tebing Siring	AKTIF
136	Kecamatan Bumi Makmur	TP. PKK Kecamatan Bumi Makmur	AKTIF

137	Bumi Harapan	TP. PKK Desa Bumi Harapan	AKTIF
138	Kurau Utara	TP. PKK Desa Kurau Utara	AKTIF
139	Sungai Rasau	TP. PKK Desa Sungai Rasau	AKTIF
140	Pantai Harapan	TP. PKK Desa Pantai Harapan	AKTIF
141	Handil Birayang Atas	TP. PKK Desa Handil Birayang Atas	AKTIF
142	Handil Labuan Amas	TP. PKK Desa Handil Labuan Amas	AKTIF
143	Handil Suruk	TP. PKK Desa Handil Suruk	AKTIF
144	Handil Birayang Bawah	TP. PKK Desa Handil Birayang Bawah	AKTIF
145	Handil Babirik	TP. PKK Desa Handil Babirik	AKTIF
146	Handil Gayam	TP. PKK Desa Handil Gayam	AKTIF
147	Handil Maluka	TP. PKK Desa Handil Maluka	AKTIF
TOTAL PKK = 147			

Foto Seksi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat (PKK)



KEGIATAN JAMBORE KADER PKK



PERTEMUAN TPP PKK KAB.TANAH LAUT DENGAN TP PKK KEC.BUMI MAKMUR DAN KURAU

Foto Seksi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat (MTP)



c. Sasaran Eselon III (Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan)

Hasil Capaian Realisasi Sasaran Pada Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya administrasi desa	Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian								100%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata – rata Capaian Kinerja Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan telah terealisasi 100%. Dari 1 indikator kinerja, indikator Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik telah tercapai 100% dari target 100%.

b) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan target tahun 2021 dengan tahun 2022 yang terdiri dari indikator Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik tercapai 100% pada tahun 2022 dan juga tahun 2021 sebelumnya.

c) Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik

Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 ditargetkan mencapai angka 100%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik berada pada 3 Seksi yaitu Seksi Bina Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Seksi Bina Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Pencapaian atas target indikator ini tercapai atas kerja keras dan kerjasama seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Foto Pemerintahan Desa dan Kelurahan



Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa terkait Produk Hukum Desa Tanggal 28 Maret 2022



Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa terkait Produk Hukum Desa Tanggal 28 Maret 2022



Foto Kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022.

a) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	159.992.317
2	Jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembangannya			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	41.148.577

A. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

a. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Dengan indikator keluaran jumlah aparatur pemerintahan desa yang diberikan pelatihan / bimbingan teknis dengan target 7 orang terealisasi 7 orang atau 100%. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 159.992.317,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 136.311.844,- atau 85,20%.

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Dengan indikator keluaran jumlah desa berciri khas yang terbentuk dengan target 5 desa dan terealisasi 7 desa melebihi target yang telah ditetapkan, jumlah desa yang dievaluasi dengan target

11 desa terealisasi 11 desa atau 100% , jumlah kelurahan yang dievaluasi dengan target 1 kelurahan terealisasi 1 kelurahan atau 100%. Pagu anggaran sebesar Rp. 41.148.577,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.120.000,- atau 70,77%.

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan keuangan desa	1377 orang	1377 orang	100%
2	Melakukan pembinaan pengelolaan aset desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan aset desa		141 orang	100%
	Rata-rata capaian				100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
		2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan keuangan desa	1560 orang	934 orang	1377 orang	1377 orang	1377 orang	100%
2	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan aset desa	1560 orang	141 orang	141 orang		141 orang	100%
	Rata-rata Capaian						100%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata – rata capaian kinerja Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa tahun 2022 terealisasi 100%. Hal ini disebabkan karena kerja keras bidang Pemerintahan dan Desa dalam melaksanakan kegiatan.

b) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2022 (100%) dan tahun 2021.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Jumlah aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan keuangan desa.

Terealisasi sebanyak 1377 orang aparat pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan keuangan desa dengan target total 1377 orang, yang berarti terealisasi 100%. Hal ini disebabkan karena kerja keras bidang Pemerintahan dan Desa dalam melaksanakan kegiatan serta arahan yang terus menerus ditekankan oleh kepala SKPD.

- Jumlah aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan aset desa.

Terealisasi sebanyak 141 aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan aset desa tentang APBDesa untuk meningkatkan kapasitasnya dari total target 1560 orang. Ini terealisasi 100%.

d) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.544.374.609,-
2	Melakukan pembinaan pengelolaan aset desa			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	18.817.946,-

A. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

a. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan indikator keluaran jumlah aparatur pemerintahan desa yang dibina, tim evaluasi raperdes tentang APBDesa kecamatan terealisasi 1377 orang dari total target 1377 orang atau realisasi fisik 100%. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 2.544.374.609,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.197.321.345,- atau 86,36%.

b. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa

Dengan indikator keluaran jumlah aparatur kecamatan dan pemerintahan desa yang dibina terealisasi 141 orang realisasi fisik 100%. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 18.817.946,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.270.000,- atau 91,77%

d. Sasaran Eselon III (Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan)

Hasil Capaian Realisasi Sasaran Pada Bidang Bina Pengembangan

Kawasan Perdesaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
			2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya pengembangan kawasan perdesaan	Persentase pengembangan kawasan perdesaan	100%	100%	40%	40%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas data desa	Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa	100%	100%	40%	40%	100%	100%
3	Meningkatnya kemampuan pengurus Lembaga Adat Desa	Persentase lembaga adat desa yang dibina	100%	100%	40%	40%	100%	100%
4	Cakupan kinerja evaluasi tingkat perkembangan desa	Persentase desa yang dievaluasi tingkat perkembangannya						
Rata-rata Capaian								100%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata – rata Capaian Kinerja Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan telah terealisasi 100%. Dari 3 indikator kinerja, indikator Persentase pengembangan kawasan perdesaan telah tercapai 100% dari target 40%. Indikator Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa telah tercapai 100% dari target 40%. Dan indikator yang terakhir Persentase lembaga adat desa yang dibina juga telah tercapai 100% dari target 40%. Untuk indikator Persentase desa yang dievaluasi tingkat perkembangannya target tidak ada dan pada saat pelaksanaan tahun 2022 dipindahkan dan disesuaikan dengan tupoksi pada Kasi Bina Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes & Kel sehingga secara tidak langsung kegiatan dilaksanakan oleh Kasi Bina Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes & Kel.

b) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan target tahun 2021 dengan tahun 2022 yang terdiri dari indikator Persentase pengembangan kawasan perdesaan tercapai 100% pada tahun 2022 dan juga tahun 2021 sebelumnya. Indikator Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa tercapai 100% pada tahun 2022 dan juga tahun 2021 sebelumnya. Dan yang terakhir indikator Persentase lembaga adat desa yang aktif juga tercapai 100% pada tahun 2022 dan juga tahun 2021 sebelumnya.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Indikator Persentase pengembangan kawasan perdesaan.

Indikator Persentase pengembangan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 ditargetkan mencapai angka 40%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan Persentase pengembangan kawasan perdesaan berada pada Seksi Bina Pengembangan Kawasan.

- Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa.

Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 ditargetkan mencapai angka 40%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa berada pada Seksi Bina Data dan Profil Desa.

- Persentase lembaga adat desa yang aktif.

Persentase lembaga adat desa yang aktif yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 ditargetkan mencapai angka 40%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan Persentase lembaga adat desa yang aktif berada pada Seksi Bina Adat dan Budaya Desa. Pencapaian atas semua target indikator tersebut tercapai atas kerja keras dan kerjasama seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan.

d) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase pengembangan kawasan perdesaan	Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	141.854.554,-
2	Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	154.882.072,-
3	Persentase lembaga adat desa yang dibina	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	61.586.961,-
4	Persentase desa yang dievaluasi tingkat perkembangannya				Kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemdes & Kel

- Program Peningkatan Kerjasama Desa Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa
 - a. Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Dengan indikator keluaran Jumlah Bimtek Kelembagaan BKAD dengan target 1 kali terealisasi 1 kali (100%), Jumlah Bumdesma yang Dibentuk dengan target 5 Bumdesma terealisasi 5 Bumdesma (100%) dan Jumlah Sosialisasi 2 kali dengan realisasi 2 kali (100%). Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 141.854.554,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 122.188.000,- atau 86,14%.
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - b. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa dengan indikator keluaran Jumlah Pokja Prodes yang dilatih dengan target 130 Pokja Prodes terealisasi 130 Pokja Prodes (100%). Pagu anggaran Rp. 154.882.072,- dengan realisasi anggaran Rp. 149.434.756,- atau 96,48%.
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - c. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt, Rw, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator keluaran Jumlah Pembinaan LAD dengan target 5 LAD terealisasi 5 LAD (100%). Pagu Anggaran Rp. 61.586.961,- dengan realisasi Rp. 57.978.100,- atau 94,14%.

KEGIATAN BIMTEK BKAD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2022





**SOSIALISASI PEMBENTUKAN BUMDESMA DI KECAMATAN KURAU
TAHUN ANGGARAN 2022**





RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA SINERGY PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DESA (LAD) TAHUN ANGGARAN 2022





**KEGIATAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DESA DI 5 LAD
TAHUN ANGGARAN 2022**





Analisa Pencapaian Sasaran

Misi Kabupaten Tanah Laut yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut, yaitu :

1. **Menciptakan Inovasi di Segala Sendi Kehidupan dan Pengembangan Industri Kreatif.**

Misi ini mengandung makna bagaimana meningkatkan inovasi di masyarakat dan mengembangkan industri kreatif untuk bisa meningkatkan kontribusi industri kreatif dalam perekonomian. Strategi yang akan dicapai yaitu pengembangan standar pelayanan untuk penyebarluasan informasi, dengan arah kebijakan penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat.

Untuk mendukung Misi “**Menciptakan Inovasi di Segala Sendi Kehidupan dan Pengembangan Industri Kreatif**”, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut memiliki Program dan Kegiatan, yaitu :

- **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

adapun sub kegiatan yang termasuk kedalam program ini adalah :

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini masuk pada misi “Menciptakan Inovasi di Segala Sendi Kehidupan dan Pengembangan Industri Kreatif” dikarenakan Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota salah satunya pembinaan posyantek desa dan kecamatan yang dibina. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Ini Juga Masuk pada Misi “Membangun Sinergitas yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” karena pada kegiatan ini juga melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti lembaga kemasyarakatan lainnya. Sehingga nantinya akan tercipta suatu inovasi-inovasi dari pemuda-pemuda yang ada di daerah pedesaan dengan menumbuhkan karya-karya produktif.

2. **Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**

Misi ini mengandung makna bagaimana meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi, supaya meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik, transparansi penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk meningkatkan kinerja reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya peningkatan kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja, pengembangan standar penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan arah kebijakan memberikan kesempatan kepada ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengembangkan kompetensi dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing PNS di lingkup Dinas PMD. Untuk mendukung Misi “**Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**”, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, adapun sub kegiatan yang termasuk kedalam program/kegiatan ini adalah :
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, adapun sub kegiatan yang termasuk kedalam program/kegiatan ini adalah :
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

3. **Membangun Sinergitas yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.**

Misi ini mengandung makna peningkatan kinerja pembangunan yang berkualitas bidang ekonomi dan sosial budaya (pembangunan inklusif), peningkatan upaya membangun desa, menata kota. Diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan desa membangun. Dengan strategi meningkatkan partisipasi peran serta perempuan dalam pembangunan, mendorong tertib administrasi dalam pemerintahan desa, partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa, mengoptimalkan peran aparatur baik di pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan, meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan, mengoptimalkan peran lembaga perekonomian desa dalam meningkatkan perekonomian desa, mendorong tertib administrasi pertanahan kawasan perdesaan dan mengoptimalkan lahan kawasan perdesaan. Dan arah kebijakan melakukan pembinaan terhadap PKK kecamatan maupun desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat, pembinaan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan, monev terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, pelatihan terhadap aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan, pembinaan terhadap lembaga ekonomi desa, pemanfaatan lahan kawasan perdesaan dan monev terhadap lahan kawasan perdesaan.

Untuk mendukung Misi "**Membangun Sinergitas yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**", Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut memiliki Program dan Kegiatan, yaitu:

- **Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa**
 - a. **Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa**
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- **Program Peningkatan Kerjasama Desa**
 - a. **Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa**
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

- **Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat**
 - a. **Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota**

Sub Kegiatan Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan, kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- **Program Administrasi Pemerintahan Desa**
 - a. **Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa**

Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar desa
- **Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat**
 - a. **Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota**

Sub Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan TTG

Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat

Sub Kegiatan Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga
- **Program Administrasi Pemerintahan Desa**
 - a. **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**

Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan kelurahan
 - b. **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**

Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa

c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum desa

- Program Penataan Desa

a. Kegiatan Penyelenggaraan penataan desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa

Uraian dan Analisa Capaian Sasaran Strategis

Capaian Sasaran Strategis untuk tahun 2022 merupakan capaian tahun ke tiga dalam renstra 2018- 2023 hal ini menjadi parameter keberhasilan dinas serta sebagai pendorong Peningkatan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut, analisa atas capaian Kinerja pada Setiap sasaran dapat dilihat Sebagai berikut :

Sasaran	Indeks Desa Membangun
---------	-----------------------

Sasaran ini mengandung makna bagaimana Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan Kondisi Desa saat ini. Serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam meningkatkan klasifikasi status desa dikembangkan berdasar konsepsi bahwa Desa untuk maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi dan kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Indikator Desa membangun :

- Ketahanan Sosial (Kesehatan, Pendidikan, Modal Sisial, Permukiman)
- Ketahanan Ekonomi (Ekonomi)
- Ketahanan Ekologi (Ekologi)

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2022

Secara umum realisasi keuangan pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan pagu Keseluruhan :

a. Pagu : Rp. 11.733.605.829,-

terdiri dari :

- Belanja Pegawai Rp. 5.006.343.671,-
- Belanja Tidak Langsung Rp. 6.727.262.158,-

Untuk belanja langsung dengan 5 (lima) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan denganrealisasi capaian Keuangan Rp. 10.205.122.919 , - diperoleh prosentase sebesar 86,97%.

Ringkasan realisasi APBD terhadap 2022

Uraian	Tahun 2022	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung		
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.598.386.729,-	1.965.911.553,-
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.407.956.942,-	2.261.934.262,-
Belanja Langsung		
Belanja Barang dan Jasa	6.550.039.596,-	5.817.325.104,-
Belanja Modal	177.222.562,-	159.952.000,-

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OutPut Dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2022 Rp	Realisasi			
					Fisik/Kinerja	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9=(8/5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	8.545.567,-	12	100	7.228.500,-	85
01	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen	6 dokumen	4.003.879,-	6	100	3.362.500,-	84
02	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SKPD	Jumlah Laporan	6 Laporan	4.541.688,-	6	100	3.866.000,-	85
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		31	5.013.204.564,-	31	100	4.233.832.015,-	
03	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	5.006.343.671,-	12	100	4.227.845.815,-	84
04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan	19 laporan	6.860.893,-	19	100	5.986.200,-	87
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			493.213.391,-			460.055.179,-	93

01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis	22 jenis	6.742.281,-	22 jenis	100	5.511.500,-	82
02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis	8 jenis	130.410.693,-	7 jenis	100	116.863.005,-	90
03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis	24 jenis	6.218.976,-	24 jenis	100	4.886.500,-	79
04	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis	8 jenis	7.313.439,-	8 jenis	100	6.168.800,-	84
		Jumlah Pengadaan	12490 lembar		11250 lembar	90		
05	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	400 orang/kali	342.526.00,-	381 orang/kali	95	326.625.374	95
		Jumlah perjalanan dinas diluar daerah	1 tahun		1 tahun	100		
		Jumlah rapat	24 kali		20 kali	83		
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		31	580.738.557,-	31	100	543.659.675,-	94
01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis	4 jenis	43.056.134,-	3 jenis	75	22.645.275,-	53
02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis	3 jenis	26.750.000,-	3 jenis	100	17.072.000,-	64
03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis	4 jenis	510.932.423	4 jenis	100	503.942.400,-	99
		Jumlah PTT	20 orang		20 orang	100		

5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		14	152.482.150,-			142.566.700	93
01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit/Kendaraan Jabatan	1unit	25.000.000,-	1 unit	100	24.977.300,-	100
02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit/Kendaraan Operasional	13 unit	127.482.150,-	13 unit	100	117.589.400,-	92
II	PROGRAM PENATAAN DESA		11 desa	300.943.946,-	11	100	258.004.000,-	86
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa		11 desa	300.943.946,-	11	100	258.004.000,-	86
01	Sub Kegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang di tetapkan dan ditegaskan batas desa	11 desa	300.943.946,-	11	100	258.004.000,-	86
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		8	141.854.554,-	8	100	122.188.000,-	86
1	Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa		8	141.854.554,-	8	100	122.188.000,-	86
01	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek Kelembagaan BKAD	1 kali	141.854.554,-	1 kali	100	122.188.000,-	86
		Jumlah BUMDesma yang dibentuk	5 Bumdesma		5 Bumdesma	100	-	
		Jumlah Sosialisasi	2 kali		2 Kali	100	-	

IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		1930	3.446.540.758,-	1,881	97	2.915.472.445,-	85
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1930	3.446.540.758,-	1,881	97	2.915.472.445,-	85
01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bimtek /Sosialisasi Administrasi Pemdes	1 kali	67.587.350,-	1 kali	100	58.773.000,-	87
02	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi	130 desa	66.665.473,-	3 desa	2	25.201.800,-	38
03	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Terbinanya Aparatur Pemerintah Desa dan Aparatur Pemerintahan Kec	1377 orang	2.544.374.609,-	1377 orang	100	2.197.321.345,-	86
04	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Desa Berciri khas yang dibina	5 desa	159.992.317,-	7 desa	100	136.311.844,-	85
		Jumlah Orientasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Berprestasi	1 kali		1 kali	100		
		Jumlah Desa Tertinggal yang dibina	2 desa		2 desa	100		

05	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antarDesa	Jumlah badan usaha milik desa (BUMDesa) yang dibentuk	15 Bumdesa	393.072.414,-	15 Bumdesa	100	302.039.700,-	77
		Jumlah badan usaha milik desa (BUMDesa) yang dibina	115 Bumdesa		124 Bumdesa	100		
		Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas badan usaha milik desa (BUMDesa)	1 kali		1 kali	100		
06	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Pokja Prodes yang dilatih	130 pokja prodes	154.882.072,-	130 pokja prodes	100	149.434.756,-	96
07	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Terbinanya Aparatur Pemerintah Desa dan Aparatur Pemerintahan Kec	141 Aparatur	18.817.946,-	141 Aparatur	100	17.270.000,-	92
08	Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang dievaluasi	11 desa	41.148.577,-	11 desa	100	29.120.000,-	71
		Jumlah desa yang dievaluasi	1 desa		1 desa	100		
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		80	1.596.082.342,-	80	100	1.522.116.405,-	95

	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		80	1.596.082.342,-	80	100	1.522.116.405,-	95
01	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pembinaan LAD	5 LAD	61.586.961,-	5 LAD	100	57.978.100,-	94
02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Jumlah Dilaksanakannya Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang	29 desa	677.953.812,-	29 desa	100	654.764.000,-	97
03	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah kec yang melakukan pemetaan usaha ekonomi desa	2 kec	75.436.900,-	2 kec	100	66.501.400,-	88

		Jumlah Terealisasinya Pembuatan Program Database Pemetaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 prog database		1 prog database	100		
04	Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dilaksanakannya Kaji Tiru Posyantek	1kali	249.989.764,-	1 kali	100	236.440.600,-	95
		Jumlah Dilaksanakannya Lomba Kreasi dan Inovasi TTG Tk Kabupaten	1 kali keg		1 Kali Keg	100		
		Jumlah dilaksanakannya Pelatihan Penguatan Kelembagaan Posyantek Desa	2 angkatan		2 Angkatan	100		
		Jumlah dilaksanakannya Sosialisasi dan Pembentukan Posyantek	21 desa		12 desa	100		
05	Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dilaksanakannya Jambore Kader PKK	1 kali keg	531.114.905,-	1 kali keg	100	506.432.305,-	95
		Jumlah Dilaksanakannya Lomba	5 lomba		5 lomba	100		
		Jumlah Dilaksanakannya Pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan	1 kali keg		1 kali keg	100		
		Jumlah pelaksanaan peringatan HKG PKK	1 kali keg		1 kali keg	100		

		Jumlah Dilaksanakannya Pertemuan PKK Desa	2 kali keg		2 kali keg	100		
		Jumlah Dilaksanakannya Pertemuan Rutin Bulanan TP PKK	5 kali keg		5 kali keg	100		
		Jumlah Dilaksanakannya Rakon PKK	1 kali keg		1 kali keg	100		
		Jumlah Dilaksanakannya Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja	1 kali sosialisasi		1 kali sosialisasi	100		
		Jumlah Dilaksanakannya Workshop LP3PKK	1 kali workshop		1 kali workshop	100		

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung				
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.190.604.116,-	1.924.146.544,-	2.598.386.729,-	1.965.911.553,-
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.259.706.086,-	2.266.241.662,-	2.407.956.942,-	2.261.934.262,-
Belanja Langsung				
Belanja Pegawai	6.450.310.202,-	4.190.388.206,-	5.006.343.671,-	4.227.845.815,-
Belanja Barang dan Jasa	11.144.685.911,-	8.062.660.554,-	6.550.039.596,-	5.817.325.104,-
Belanja Modal	318.933.230,-	245.207.724,-	177.222.562,-	159.952.000,-

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri sebagai pelaku pembangunan merupakan proses yang memerlukan kerja keras dari berbagai pihak yang mengemban amanat tersebut. Untuk itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah laut perlu senantiasa berupaya untuk pencapaian tata kelola Pemerintahan yang baik. Disamping itu juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut senantiasa berkinerja produktif dalam memberikan pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berorientasi kepada Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan terbitnya undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut telah Berupaya melakukan pembenahan proses kerja internal dan eksternal. Harapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dapat menjadi pendorong Pemerintahan Desa untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat.

Di samping itu dari perspektif keuangan realisasi penyerapan harus ditingkatkan agar konsistensi dapat dilakukan secara baik. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut perlu menekankan komitmen untuk terus belajar dan senantiasa tumbuh dalam meningkatkan semangat kerja dan kesadaran kerja dalam memacu kinerja yang lebih baik dalam rangka keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dalam jangka panjang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi tentang berbagai capaian kinerja berbagai sasaran strategis dan indicator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara transparansi dan akuntabilitas sehingga mampu dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governace) di Kabupaten Tanah Laut

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik akan semakin meningkat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut berperan aktif melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan Lahirnya undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, segenap elemen Pemerintahan, Kelembagaan, dan Masyarakat desa dituntut untuk lebih aktif dalam membangun dan memajukan desa.

Filosofi dari pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya desa mandiri dengan dasar /

fundamen pada keberdayaan Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Keberdayaan kehidupan sosial (Manusia dan Komunitas), Kelestarian nilai-nilai budaya, kemandirian perekonomian masyarakat desa (penanggulangan kemiskinan dan pengangguran) dan keberdayaan masyarakat di bidang Teknologi berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG).

Dengan memperhatikan perihal diatas, maka rencana tindak lanjut (sebagai langkah proaktif) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut yang dapat dilaksanakan ke depan adalah :

1. Secara Internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Tekhnis, in house training).
2. Secara Kelembagaan, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui penetapan skala prioritas pada program dan kegiatan dengan mengacu :
 - a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023
 - b. Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat
 - c. Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Secara Eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementrian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementrian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan SKPD terkait dalam lingkup Kabupaten Tanah Laut, serta Lembaga/Instansi lainnya,dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tanah Laut.

Pada akhirnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut berupaya meningkatkan pembinaan (Komunikasi, Kerjasama dan Intensivikasi pendampingan) terhadap desa dalam rangka :


- a. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Meningkatkan Kinerja Kelembagaan masyarakat desa, melalu pengembangan peran serta LPM dalam proses perencanaan dan pembangunan, Pengembangan Lembaga Adat,

- c. Optimalisasi pembangunan desa menuju desa maju dan mandiri, melalui pengembangan ekonomi desa (BUMDesa, Posyantek, Teknologi Tepat Guna (TTG)
- d. Melaksanakan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Demikian, penyusunan LAKIP tahun 2023 ini kami buat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Pelahan, 20 Januari 2023

**Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tadah Laut**



H. BAMBANG KUSUDARISMAN, S.IP, M.Si
NIP. 19680816 199010 1 003